

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUKU
TALANG MAMAK DI KAWASAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA
PULUH DALAM BUDIDAYA MADU KELULUT
(STUDI DI DESA RANTAU LANGSAT KECAMATAN BATANG GANSAL
KABUPATEN INDRAGIRI HULU)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pada Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



RIDO IDHAM
NPM : 177110214

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2021**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Rido Idham
Npm : 177110214
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu).

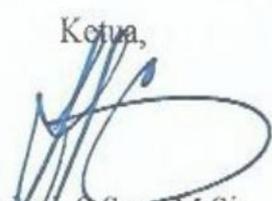
Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini, telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode Penelitian Ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang komprehensif.

Pekanbaru, 24 November 2021

Turut menyetujui:

Pembimbing,

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Ketua,

Lilis Surlana, S.Sos., M.Si


Herman, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

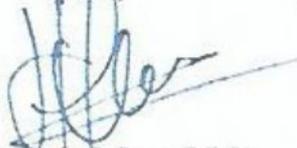
PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Rido Idham
Npm : 177110214
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu).

Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 13 Januari 2022

Ketua,



Herman, S.Sos., M.Si

Sekretaris,



Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Anggota,



DR. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si

Mengetahui
Wakil Dekan I



Indra Safri, S.Sos., M.Si

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1654/UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 391/UIR/KPTS/2020, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :
- Nama : Rido Idham
N P M : 177110214
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu).
- Struktur Tim :
- Herman, S.Sos., M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
 - Eko Handrian, S.Sos., M.Si Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
 - Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si. Sebagai Anggota merangkap Penguji
2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Desember 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si
NPK. 080102337

Tembusan Disampaikan Kepada :

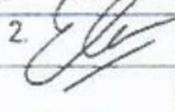
- Yth. Bapak Rektor UIR
- Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
- Yth. Ketua Prodi
- Arsip -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 1654/UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 15 Desember 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 16 Desember 2021 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Rido Idham
NPM : 177110214
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu)
Nilai Ujian : Angka : *80* ; Huruf : *A*
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Herman, S.Sos., M.Si	Ketua	1. 
2.	Eko Handrian, S.Sos., M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Dia Meirina Suri, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.		Notulen	4.

Pekanbaru, 16 Desember 2021

An. Dekan


Indra Satri, S.Sos., M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rido Idham
Npm : 177110214
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu).

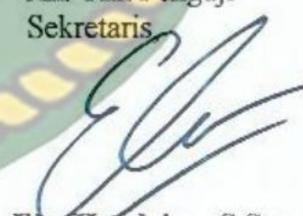
Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 13 Januari 2022
An. Tim Penguji
Sekretaris

Ketua



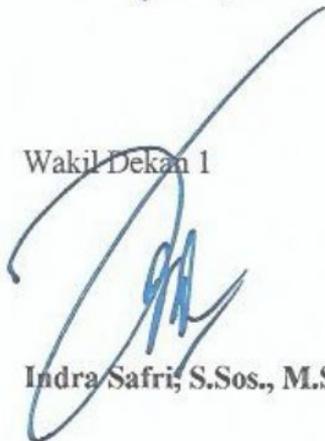
Herman, S.Sos., M.Si



Eko Handrian, S.Sos., M.Si

Turut Menyetujui,

Wakil Dekan 1



Indra Safri, S.Sos., M.Si

Program Studi Administrasi Publik
Ketua



Lilis Suriani, S.Sos., M.Si

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin serta senantiasa mengharap Rahmat dan Ridho Allah SWT, penulis merasa sangat bersyukur atas petunjuk dan penerangan yang telah diberikan Allah SWT, sehingga penulis dapat merampungkan Usulan Penelitian ini yang penulis beri judul dengan **“Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu)”**. Shalawat beriring salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan pengajaran, sehingga terbukalah berbagai hikmah ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia hingga akhir zaman.

Penulisan usulan penelitian ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar sarjana pada jurusan pada jurusan Ilmu Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang menjadi tempat penulis menimba Ilmu pada fase Perguruan Tinggi.

Pada kesempatan yang baik ini, tidak lupa penulis menyampaikan terimakasih yang setulus- tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung atas segala dukungan, bantuan, bimbingan, pengarahan, nasehat dan pemikiran dari berbagai pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan usulan penelitian ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal, M.si selaku Dekan FISIPOL Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suryani, S.sos, M.si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik dan seluruh dosen jurusan ilmu administrasi publik yang telah memfasilitasi dan memberi ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam menulis usulan penelitian ini.
4. Bapak Eko Handrian, S.sos, M.si selaku sekretaris Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
5. Bapak Herman, S.Sos., M.Si selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membagi pengetahuan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini terhadap apa yang telah di arahkan.
6. Yang sangat Teristimewa dengan ucapan terimakasih yang tiada terhingga penulis persembahkan kepada Ayahanda Sukarni dan Ibunda Umi Dawati tercinta yang selalu memberi doa dan dorongan secara moril dan materil

kepada penulis, juga memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa, serta tidak pernah lelah, selalu sabar dan memberikan kasih sayang yang tidak pernah bertepi untuk memperjuangkan nasib anak-anaknya menjadi lebih baik.

7. Kakak dan Adik saya tercinta Ruti Fitria, Ratih Purnama Fitri, Risma Pirgawati dan Rasyid Syaifullah yang telah menjadi semangat tersendiri bagi saya.
8. Kepada Febri Nadia sebagai partner diskusi saya yang telah banyak membantu memberikan saran, ide dan bantuan terhadap beberapa hal yang saya tidak mengerti dalam pengerjaan ini.
9. Sahabat saya Almarhum Aswin Tata Bisono yang masih melekat di ingatan saya dan selalu menjadi semangat tersendiri bagi saya dalam pengerjaan naskah penelitian ini.
10. Sahabat-sahabat saya Windi Aprian Sury, Juwita Rahma, Mardianto dan Surita yang membantu menyemangati saya untuk bisa mengerjakan penelitian dengan baik.
11. Teman-teman BEM FISIPOL UIR Kabinet Sasbayanaka periode 2019/2020 yang telah menyemangati dan menuntut saya untuk bisa fokus dan serius mengerjakan penelitian ini.
12. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2017 jurusan Administrasi Publik terutama pada Organisasi Himia Publik, serta rekan-rekan yang telah memberikan dukungan penuh kepada saya yang tidak dapat saya cantumkan disini.

Naskah Usulan Penelitian ini penulis sadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat positif dari semua pihak yang telah membaca penelitian ini, untuk kesempurnaan usulan penelitian penulis.

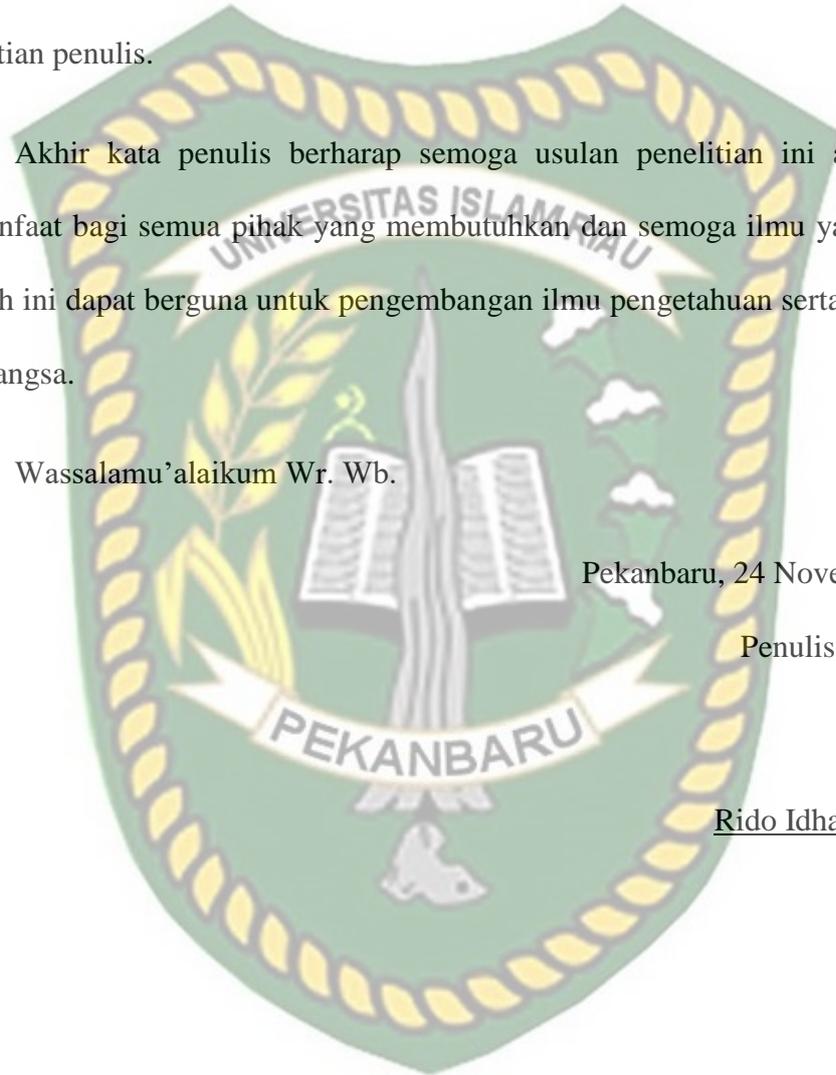
Akhir kata penulis berharap semoga usulan penelitian ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 24 November 2021

Penulis

Rido Idham



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xix
ABSTRAK	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	19
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	20
A. Studi Kepustakaan.....	20
1. Konsep Administrasi	20
2. Konsep Organisasi.....	22
3. Konsep Manajemen.....	25
4. Konsep Kebijakan Publik.....	28
5. Konsep Implementasi	29
7. Konsep Pemberdayaan	33
B. Kerangka Berpikir	35
C. Konsep Operasional	37
D. Operasional Variabel	39
E. Teknik Pengukuran.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	44

A. Tipe Penelitian	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Populasi dan Sampel	45
D. Teknik Penarikan Sampel	46
E. Jenis dan Sumber Data	47
F. Teknik Pengumpulan Data.....	48
1. Kuesioner.....	48
2. Wawancara	49
3. Observasi	50
4. Dokumentasi.....	50
G. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	52
A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu.....	52
B. Gambaran Umum Desa Rantau Langsung	54
C. Gambaran Umum Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.....	58
D. Struktur Organisasi Di Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh	63
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Identitas Responden	68
B. Tanggapan Responden Penelitian Terhadap Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu).....	73
1. Standar dan Sasaran.....	74
2. Sumber Daya	79
3. Komunikasi Antar Organisasi	84
4. Karakteristik Pelaksana	88
5. Lingkungan Sosial dan Ekonomi	94
6. Sikap Pelaksana	99
C. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu).....
BAB VI PENUTUP	115

A. Kesimpulan	115
B. Saran.....	120
DAFTAR PUSTAKA	123
Lampiran	125



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.1	: Pembagian Zonasi TNBT	2
II.1	: Pembagian Wilayah TNBT di dalam wilayah Kabupaten di Provinsi Riau dan Jambi	3
III.1	: Kelompok Tani Hutan Binaan TNBT dalam Budidaya Madu kelulut	9
IV.1	: Jumlah Bantuan TNBT dalam Budidaya Madu Kelulut untuk wilayah tradisional	12
I.2	: Operasional Variabel Penelitian	39
III.1	: Populasi dan Sampel Penelitian	46
IV.1	: Nama-nama kepala desa rantau langsung dalam kurun waktu 55	
IV.2	: Jumlah Penduduk Desa Rantau Langsung	57
IV.3	: Program-program pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh TNBT dalam kegiatan mitra konservasi	60
IV.4	: Rangkaian Kegiatan Pembinaan KTH dalam Program Kemitraan Konservasi	62
IV.5	: Jumlah SDM di Balai TNBT berdasarkan jabatan	66
V.1	: Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Umur Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa .69	
V.2	: Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Umur Ketua KTH dan Anggota KTH	69
V.3	: Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa	70
V.4	: Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan Ketua KTH dan Anggota KTH	71
V.5	: Distribusi Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa	72

V.6	: Distribusi Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin Ketua KTH dan Anggota KTH	73
V.7	: Tanggapan Responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa Dilihat Dari Indikator Standar dan Sasaran.....	74
V.8	: Tanggapan Responden Ketua KTH dan Anggota KTH Dilihat Dari Indikator Standar dan Sasaran	77
V.9	: Tanggapan Responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa Dilihat Dari Indikator Sumber Daya	79
V.10	: Tanggapan Responden Ketua KTH dan Anggota KTH Dilihat Dari Indikator Sumber Daya	82
V.11	: Tanggapan Responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa Dilihat Dari Indikator Komunikasi Antar Organisasi	84
V.12	: Tanggapan Responden Ketua KTH dan Anggota KTH Dilihat Dari Indikator Komunikasi Antar Organisasi	87
V.13	: Tanggapan Responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa Dilihat Dari Indikator Karakteristik Pelaksana	89
V.14	: Tanggapan Responden Ketua KTH dan Anggota KTH Dilihat Dari Indikator Karakteristik Pelaksana	92
V.15	: Tanggapan Responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa Dilihat Dari Indikator Lingkungan Sosial dan Ekonomi	94
V.16	: Tanggapan Responden Ketua KTH dan Anggota KTH Dilihat Dari Indikator Lingkungan Sosial dan Ekonomi.....	97
V.17	: Tanggapan Responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa Dilihat Dari Indikator Sikap Pelaksana.....	99
V.18	: Tanggapan Responden Ketua KTH dan Anggota KTH Dilihat Dari Indikator Sikap Pelaksana.....	102
V.19	: Rekapitulasi Tanggapan Responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa Tentang Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya	

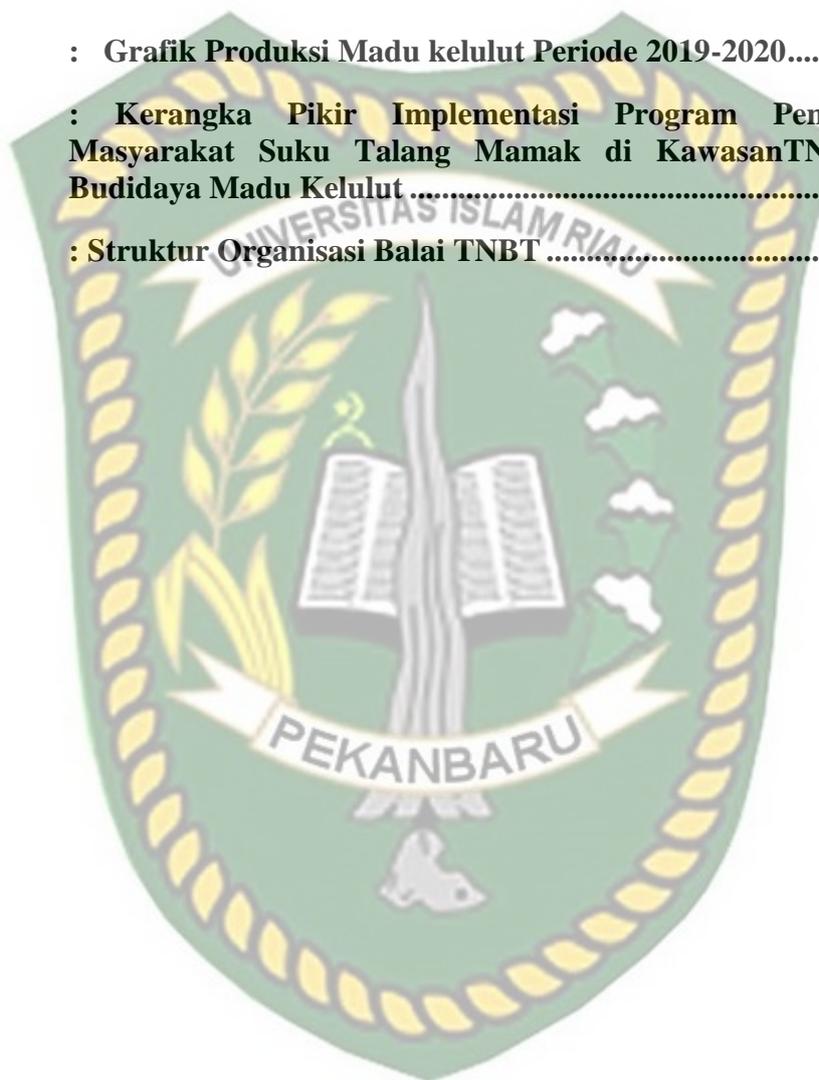
Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu)..... 104

V.20 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Ketua KTH dan Anggota KTH Tentang Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu) 108



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1	: Grafik Produksi Madu kelulut Periode 2019-2020..... 15
II.1	: Kerangka Pikir Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak di Kawasan TNBT dalam Budidaya Madu Kelulut 36
II.1	: Struktur Organisasi Balai TNBT 63



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1 : Daftar Kuisioner Penelitian.....	125
Lampiran 2 : Daftar Kuisioner Penelitian.....	135
Lampiran 3 : Daftar Wawancara	145
Lampiran 4 : Data Telly Penelitian Responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa	147
Lampiran 5 : Data Telly Penelitian Responden Ketua KTH dan Anggota KTH.....	148
Lampiran 6 : Dokumentasi penelitian	151
Lampiran 7 : Surat Rekomendasi Riset FISIPOL UIR	156
Lampiran 8 : Surat Rekomendasi DPMPTSP Provinsi Riau	157
Lampiran 9 : Surat Rekomendasi Riset DPMPTSP Kabupaten Indragiri Hulu	158
Lampiran10 : Surat Izin Penelitian/Surat Izin Memasuki Kawasan Konservasi (SIMAKSI)	159
Lampiran 11 : Notulen Persentasi Rencana Penelitian Di Balai TNBT..	160
Lampiran12 : SK Dekan FISIPOL UIR tentang Penetapan Dosen Pembimbing.....	161
Lampiran 13 : Surat Keterangan Lulus Plagiasi	162
Lampiran12 : Surat Keterangan Jurnal Online Mahasiswa	163
Lampiran14 : Sertifikat bimbingan baca Al-Qur'an	164

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rido Idham
NPM : 177110214
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu).

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik, dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif Usulan Penelitian yang telah saya ikuti serta Hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 24 November 2021

Pelaku Pernyataan,

Rido Idham

**IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SUKU
TALANG MAMAK DIKAWASAN TAMAN NASIONAL BUKIT TIGA
PULUH DALAM BUDIDAYA MADU KELULUT
(STUDI DI DESA RANTAU LANGSAT KECAMATAN BATANG
GANSAL KABUPATEN INDRAGIRI HULU)**

Oleh :

Rido Idham

ABSTRAK

Program pemberdayaan masyarakat di kawasan Taman Nasional Bukit Tiga dalam kegiatan budidaya madu kelulut merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dibuat dan dikelola langsung oleh Balai Taman Nasional Bukit dengan sasaran penerima program merupakan masyarakat asli yang tinggal dikawasan taman nasional ini sendiri seperti masyarakat Suku Talang Mamak dengan tujuan memberikan kegiatan pemberdayaan agar masyarakat bisa mendapatkan pendapatan tambahan dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu. Tipe Penelitian ini adalah kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner, wawancara observasi dan dokumentasi. Dan dengan responden yakni pihak Balai TNBT dan instansi terkait beserta Kelompok Tani Hutan binaan TNBT. Pada penelitian ini hasilnya menemukan bahwa dalam pelaksanaan program sudah terlaksana hanya saja belum maksimal secara keseluruhan yang mana dikarenakan beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini seperti standar dan sasaran, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, karakteristi pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan sikap pelaksana yang ada dalam proses pelaksanaan program pemberdayaan ini tidak semuanya berada pada kategori terlaksana sehingga seluruhnya masih belum maksimal pelaksanaannya.

Kata Kunci : Implementasi, Kelulut, Program, Pemberdayaan Masyarakat, TNBT.

**IMPLEMENTATION OF THE TALANG MAMAK COMMUNITY
EMPOWERMENT PROGRAM IN BUKIT TIGA PULUH NATIONAL PARK
AREA IN HONEY KELULUT CULTIVATION
(STUDY IN RANTAU LANGSAT VILLAGE, BATANG GANSAL DISTRICT,
INDRAGIRI HULU REGENCY)**

By :

Rido Idham

ABSTRACT

The community empowerment program in the Bukit Tiga National Park area in the cultivation of kelulut honey is a community empowerment program created and managed directly by the Bukit National Park Office with the target of program recipients being indigenous people living in this national park area, such as the Talang Mamak Tribe community with the aim of providing empowerment activities so that the community can get additional income in order to meet their economic needs. This study aims to determine and analyze how the implementation of the Talang Mamak Tribe Community Empowerment Program in the Bukit Tiga Puluh National Park Area in the Cultivation of Kelulut Honey in Rantau Langsat Village, Batang Gansal District, Indragiri Hulu Regency. This type of research is quantitative with data collection through questionnaires, observation interviews and documentation. And with the respondents, namely the TNBT Hall and related agencies and the TNBT assisted Forest Farmers Group. In this study, the results found that in the implementation of the program, it had been implemented but not optimally as a whole which was due to several indicators used in this study such as standards and targets, resources, communication between organizations, characteristics of implementers, socio-economic environment and attitudes of implementers in the implementation of the program. Not all of the implementation processes of this empowerment program are in the implemented category so that all of them are still not maximally implemented.

Keywords : *Implementation, Community Empowerment ,Cultivation, , Program, , TNBT.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan Indonesia merupakan hutan hujan tropis yang mempunyai luasan hutan yang terluas ketiga di dunia setelah Brazil dan Republik Demokrasi Kongo (FWI, 2011). Menurut data statistik kehutanan tahun 2011, total luas kawasan hutan Indonesia mencapai 131,279 juta ha. Kawasan hutan tersebut di kelompokkan sesuai fungsinya menjadi kawasan konservasi, kawasan lindung, kawasan produksi terbatas, kawasan produksi dan kawasan produksi yang dapat di konversi (Kemenhut, 2012).

Jumlah kawasan konservasi di Indonesia sampai tahun 2011 sebanyak 491 unit kawasan baik daratan maupun lautan dengan luas 22,415 juta ha. Kawasan konservasi tersebut terdiri atas cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, taman nasional, taman buru, taman hutan raya dan kawasan suaka alam ditambah kawasan pelestarian alam (Kemenhut, 2012).

Salah satu bentuk pengelolaan kawasan konservasi adalah taman nasional. Menurut (UU No. 5,1990), taman nasional adalah kawasan pelestarian yang memiliki ekosistem asli yang di kelola dengan sistem zonasi yang di manfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Salah satu taman nasional yang dikelola dengan sistem zonasi yang di manfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi adalah Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.

Taman Nasional Bukit Tiga Puluh (TNBT) adalah salah satu kawasan pelestarian alam berupa ekosistem hutan hujan tropis dataran rendah (*Lowland Tropical Rain Forest*) yang di tetapkan oleh pemerintah menjadi kawasan taman nasional melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 juni 2002 dengan luas kawasan 144.223 Ha (TNBT, 2021)

Penetapan kawasan TNBT bertujuan untuk perlindungan ekologi sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem penyusunnya, pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, penelitian, menunjang budidaya dan pariwisata (BTNBT & FZS, 2009).

Sistem zonasi di kawasan TNBT di tetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor: SK 159/KSDAE/Set/KSA.0/6/2016 pada tanggal 9 juni 2016 agar mempermudah pengelolaan dan pemanfaatan taman nasional. Berikut rincian pembagian wilayah zonasi TNBT.

Tabel I.1 : Pembagian Zonasi TNBT

No	Wilayah Zonasi	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Zona Inti	55.589,34	38,54
2	Zona Rimba	75.924,37	52,64
3	Zona Pemanfaatan	1.701,88	1,18
4	Zona Tradisional	4.870,49	3,38
5	Zona Rehabilitasi	3.254,13	2,26
6	Zona Khusus	2.882,79	2,00
Total		144.223	100

Sumber Data : Balai TNBT, 2021

Pada tabel diatas dapat dilihat zona yang diterapkan untuk pemberlakuan zonasi berdasarkan kebutuhan pengelolaan dan ada zona yang akan berkaitan pada penelitian ini yakni Zona Tradisional yang mana pada zona ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan kawasan dengan pertimbangan kawasan tersebut adalah kawasan yang dihuni atau ditinggali oleh masyarakat suku lokal seperti masyarakat Suku Talang Mamak dan suku pedalaman lainnya yang berada dikawasan TNBT.

TNBT secara geografis berada di koordinat $0^{\circ}40'$ - $1^{\circ}25'$ LS dan $102^{\circ}10'$ - $102^{\circ}50'$ BT. Sedangkan secara administrasi pemerintahan, TNBT sendiri terletak atau berada dalam dua wilayah Provinsi yaitu Riau dan Jambi. Di Provinsi Riau sendiri terletak di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Indragiri Hilir, sementara di Provinsi Jambi terletak di Kabupaten Tebo dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Yang mana di setiap wilayah di masing –masing kabupaten tersebut juga memiliki luas wilayah yang telah ditentukan. Untuk lebih rinci mengenai pembagian wilayah kawasan TNBT dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel I.2 : Pembagian Wilayah kawasan TNBT di dalam wilayah Kabupaten Provinsi Riau dan Jambi.

Provinsi	Kabupaten	Luas (Ha)	Proporsi (%)
Riau	Indragiri Hulu	88.608	61.43
	Indragiri Hilir	19.577	13.57
Jambi	Tebo	24.518	17,00
	Tanjung Jabung Barat	11.520	7,98
		144.223	100

Sumber Data : Balai TNBT, 2021

Berdasarkan penjelasan tabel diatas dapat di lihat bahwa setiap kawasan yang berada di kawasan TNBT memiliki pembagian dengan luas yang berbeda,

untuk kabupaten Indragiri Hulu sendiri menjadi wilayah dengan luas kawasan yang paling luas dari kabupaten lainnya dan untuk diketahui kabupaten Indragiri Hulu itu sendiri adalah kabupaten yang menjadi daerah dari tempat tinggal masyarakat Suku Talang Mamak yang lebih tepatnya berada di Desa Rantau Langsat kecamatan Batang Gansal.

TNBT sebagai kawasan konservasi dengan bentangan alam indah yang memiliki nilai ekologis yang tinggi dan kesatuan ekosistem wilayah sekitarnya merupakan habitat flora dan fauna endemik sumatera yang terancam punah. Kawasan TNBT juga merupakan tempat tinggal dan hidup beberapa komunitas suku pedalaman seperti Suku Talang Mamak, Suku Kubu (Anak Rimba) dan Suku Melayu Tua (TNBT, 2021).

Suku Talang Mamak merupakan salah satu suku yang tinggal dan menetap di kawasan TNBT yang lebih tepatnya berada pada kawasan zona tradisional termasuk dalam kategori suku Melayu Tua (Proto Melayu) dan suku ini dipandang sebagai suku yang memiliki hak atas sumber daya alam yang ada di Indragiri. Permasalahan utama yang di temui oleh masyarakat suku Talang Mamak adalah tingkat kesejahteraan yang masih rendah karena masih mengandalkan hasil dari alam (ekstratif) seperti damar, karet, kelukup, jernang, kemenyan dan kopi sebagai pencaharian dari suku talang mamak ini sendiri. Pemenuhan kebutuhan hidup yang bergantung pada alam yang memiliki jumlahnya sangat terbatas ini di khawatirkan akan menjadi faktor pemicu terjadinya tekanan terhadap hutan berupa maraknya kegiatan *Illegal Logging*.

Dibutuhkan edukasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat suku talang mamak yang berada dikawasan konservasi seperti TNBT ini sehingga saat masyarakat merasa kebutuhan ekonominya tidak terpenuhi dapat mencari penghidupan tanpa harus merusak alam.

Kelulut (*Heterotrigona itama*) merupakan kelompok lebah tidak bersengat yang memiliki karakter untuk hidup secara satu kloni dan berhabitat di bambu, batang kayu dan tanah (Erwan & Yanuarti, 2012; michenee, 2013). Kelompok lebah ini terdistribusi di daerah tropis dan sub tropis seperti australia, amerika selatan, asia selatan dan asia tenggara (Eltz, 2001).

Jenis H . Itama merupakan salah satu jenis kelulut yang dominan di temukan di daerah pulau sumatera dan sebenarnya produk kelulut yang utama adalah propolis yang dapat di dimanfaatkan sebagai bahan kosmetik dan obat-obatan. Hasil lain dari kelulut adalah madu. Berdasarkan beberapa studi yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa kandungan senyawa *fenolik* madu kelulut yang di ternakan di perkebunan Gelam mencapai 4 kali lipat di banding madu lebah ternak dan lebih 100 kali lipat untuk kemampuan antioksidannya. Madu kelulut memiliki karakter yang berbeda dengan madu hutan yaitu memiliki kadar air lebih tinggi di bandingkan madu hutan yang ada di riau dan sumatera barat yang berkisar 23,83% s.d 26.7% (TNBT). Oleh sebab itu, produk madu kelulut memiliki prospek yang sangat bagus untuk di kembangkan terutama lagi di masa pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Kehadiran kelulut bisa menjadi alternatif solusi bagi TNBT untuk mencegah kerusakan hutan dan kegiatan yang merugikan lainnya yang

dikhawatirkan terjadi karna dampak dari belum sejahteranya masyarakat yang ada di kawasan zona tradisional TNBT dalam pendapatan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sehingga melalui hal ini didapatlah gagasan untuk melaksanakan program pemberdayaan masyarakat khususnya untuk masyarakat suku talang mamak dengan melakukan budidaya madu kelulut untuk bisa dijual dan dijadikan sebagai mata pencaharian lainnya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk suku talang mamak ini di susun dan disesuaikan melalui beberapa bentuk pelaksanaan program yang berlandaskan suatu kebijakan yakni kebijakan yang tertuang pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat Di Sekitar Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam. Serta dengan Teknis pelaksanaannya yang terdapat pada Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : P.6/KSDAE/SET/kum.1/6/2018 Tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam , yang mana aturan ini bertujuan untuk menjelaskan petunjuk teknis pelaksanaan yang dilakukan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam untuk mengembangkan kemandirian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan Konservasi dengan tetap memperhatikan kelestarian alam di kawasan tersebut.

Agar kebijakan atau peraturan menteri tersebut bisa di laksanakan oleh Balai TNBT selaku lembaga yang menangi hal yang berkaitan tersebut membuat

Rencana kerja atau pengelolaan pengembangan TNBT secara normatif yang di tuangkan dalam Kebijakan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Taman Nasional Bukit Tiga Puluh tahun 2015-2024 dengan pokok-pokok kebijakan sebagai berikut :

1. Pengelolaan TNBT di arahkan pada aktivitas yang mengarah kepada pelestarian TNBT sebagai penyangga kehidupan masyarakat sekitar TNBT dengan di dukung oleh kemantapan kelembagaan.
2. Mempertahankan kawasan TNBT dalam tata ruang nasional, provinsi dan kabupaten sebagai penyeimbang antara kawasan budidaya dan kawasan lindung.
3. Mengupayakan langkah kreatif agar TNBT berfungsi optimal sebagai penyedia jasa lingkungan dalam bentuk jasa lingkungan air, flora fauna, wisata alam dan penyerap serta penyimpan karbon.
4. Mengupayakan kawasan TNBT memiliki daya guna yang nyata, akan di upayakan ragam aktivitas yang memanfaatkan kawasan TNBT sebagai wahana penelitian, pendidikan dan penerapan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).
5. Mengimplementasikan kawasan TNBT sebagai kawasan strategis nasional melalui berbagai komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah agar kawasan TNBT menjadi Center point pembangunan wilayah.
6. Mempertimbangkan potensi ekosistem dan kedudukan secara geografis akan di upayakan kawasan TNBT menjadi basis (core) manajemen 4 DAS yaitu, DAS Pengabuan, DAS Batang Hari, DAS Indragiri dan DAS Reteh.
7. Mengupayakan pengelolaan TNBT yang berbasiskan pengelolaan ekosistem. Melalui optimalisasi pemanfaatan potensi hidrologi untuk menghasilkan hasil hutan ikutan berupa energi listrik.
8. Mengembangkan pengelolaan TNBT menuju tatanan bisnis konservasi yang seluas-luasnya antara lain wisata alam, pemanfaatan air, penangkaran dan penelitian.
9. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM pengelola sebagai antisipasi kendala sulitnya mendapat tambahan SDM, tidak tercukupinya sarana prasarana pengelolaan dan sulitnya biaya pengelolaan.

Berdasarkan pokok Kebijakan rencana pengelolaan yang telah di tentukan oleh TNBT di atas, agar bisa tercapai dan terlaksana dengan baik haruslah melaksanakan kebijakan dengan memperhatikan setiap alur dan proses dari Implementasi Kebijakan. Implementasi kebijakan menjadi hal terpenting dalam proses pencapaian tujuan yang telah di buat dalam sebuah kebijakan.

Diungkapkan oleh Lester & Stewart dalam Leo (2020:146-147) keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (*output*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Grindle yaitu pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang telah ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Dapat dinilai bahwa TNBT dalam mengupayakan tercapainya keberhasilan untuk setiap kebijakan yang sudah di buat dengan menghadirkan solusi di saat timbulnya permasalahan terhadap masyarakat lokal di kawasan zona tradisional seperti Suku Talang Mamak dengan merencanakan program pemberdayaan masyarakat suku talang mamak agar kawasan yang di kelola tetap terjaga keamanannya dari tindakan yang di khawatirkan pada pembahasan sebelumnya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat ini di maksudkan sebagai kegiatan yang sengaja di lakukan pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam mencari masalah, merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya yang berada di lingkungan mereka sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan dan kemandirian secara ekonomi, sosial dan ekologi secara berkelanjutan .

Sebelumnya, Balai TNBT telah beberapa kali melakukan kegiatan pemberdayaan seperti budidaya jernang dan kelukup, akan tetapi hasil yang di

peroleh belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat suku Talang Mamak. Sehingga pada tahun 2017, kegiatan budidaya kelulut mulai di perkenalkan kepada masyarakat Suku Talang Mamak tersebut dan kegiatan pemberdayaan ini merupakan kegiatan pemberdayaan melalui program kerja sama antara Balai TNBT dengan Balai Litbang Teknologi Serat Tanaman Hutan (BP2TSTH).

Selain bantuan berupa materi, Balai TNBT juga menginisiasi pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH) di dusun-dusun lain yang salah satu tujuannya untuk memudahkan koordinasi dan peningkatan kapasitas mereka. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah KTH pada tahun 2017 yang mana hanya berjumlah empat KTH menjadi delapan KTH pada tahun 2019 dan ada kemungkinan terus bertambah. Jumlah KTH yang sudah dibentuk dan dibina Oleh Balai TNBT terdapat pada tabel berikut :

Tabel I.3 : Kelompok Tani Hutan Binaan Balai TNBT dalam Budidaya Kelulut

No	Nama Kelompok	Lokasi
1	KTH Tunas Harapan	Desa Rantau Langsat
2	KTH Tunggal Warga	Kelurahan Selensen
3	KTH Bina Tani Sejahtera	Keritang
4	KTH Jelemu Bengayouan	Dusun Bengayouan
5	KTH Kasih Alam	Dusun Nunusan
6	KTH Bombam Berduri	Dusun Air Bombam
7	KTH Batu Berduri	Dusun Sadan
8	KTH Tualang Sejahtera	Dusun Tualang, Siambul

Sumber Data : Balai TNBT, 2021

Pada tabel diatas,KTH terbagi dibeberapa zona dan yang memang menjadi sasaran untuk Program Pemberdayaan di zona tradisional ada 4 (Empat) KTH yang Anggota setiap KTHnya ada sekitar 10 orang yang di isi oleh masyarakat Suku Talang Mamak yakni KTH Jelemu Bengayouan, Kasih Alam, Bombam Berduri dan Batu Berduri.

Jenis kelulut menyukai temperatur lingkungan dengan suhu 26°C-33°C serta dengan kelembaban 60%-82% dan ketinggian tempat 14 mdpl-131 mdpl yang di dominasi oleh tegakan dari kelompok *Dipterorcapa* yang merupakan *vegetasidominan* di Kawasan TNBT (Kerisna, 2019).

Kegiatan pemberdayaan budidaya kelulut di lakukan oleh Balai TNBT bekerja sama dengan Balai Litbang Teknologi Serat Tanaman Hutan. Dengan rangkai kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pelatihan dan Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH)

Kegiatan ini merupakan kegiatan inti yang berisikan tentang pelatihan baik teori dan praktek tentang budidaya lebah madu. Mulai dari mengenal jenis lebah, biologi lebah, peralatan dan perlengkapan budidaya lebah, tanaman pakan, manajemen lebah, hama dan penyakit, produk-produk perlebahan, teknis pemanenan dan pemasaran. Sedangkan pada tahun 2019, kegiatan pelatihan di tambah dengan materi diversifikasi produk perlebahan.

2. Kegiatan pemberian bantuan koloni lebah dan perlengkapan pendukungnya.

Pemberian bantuan berupa koloni lebah kelulut di lakukan dengan memperhitungkan jumlah anggota setiap KTH.

3. Kegiatan Pendampingan

Kegiatan ini dilakukan pasca pelatihan yang bertujuan untuk mengantisipasi jika dalam berkegiatan budidaya lebah madu terdapat permasalahan. Masalah utama yang di jumpai adalah teknis budidaya di antaranya adalah belum menghasilkan madu dan koloni belum menapai atau naik ke kotak eram madu (topping).

4. Kegiatan Pemasaran

Kegiatan ini dilakukan untuk memasarkan dan mempromosikan hasil panen utama berupa madu kelulut ke pasar. Hasil menunjukkan pada tahun 2018 s.d 2019 hampir seluruh suku talang mamak belum mengetahui bagaimana cara memasarkan produk madu sehingga mereka cenderung untuk menunggu di dusun dan menunggu pihak Balai TNBT untuk mengambil agar dapat di jual melalui koperasi pegawai TNBT. Atau dengan kata lain mereka masih belum mengerti sama sekali bagaimana cara memasarkan hasil panen mereka.

5. Kegiatan monitoring dan evaluasi

Kegiatan ini dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan untuk mencari permasalahan yang di hadapi sewaktu pelaksanaan kegiatan sebagai perbaikan untuk kegiatan selanjutnya.

Untuk lebih jelasnya mengenai bantuan yang diberikan oleh Balai TNBT kepada KTH yang berada di zona Tradisional dengan data yang akan dilampirkan berdasarkan sumber mengenai pelaksanaan program binaan dan bantuan pembudidayaan madu kelulut untuk masyarakat suku Talang Mamak dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel I.4: Jumlah bantuan yang di berikan oleh Balai TNBT dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Melalui Budidaya kelulut yang di terima oleh Empat KTH di zona Tradisional.

Nama KTH/Dusun					
No	Paket Bantuan	Jelemu Bengayouan (Bengayaouan)	Bomban Berduri (Air Bomban)	Kasih Alam (Nunusan)	Batu Berdiri (Sadan)
1	Koloni Kelulut	15	15	15	15
2	Kotak <i>Topping</i>	25	25	25	25
3	APD/masker	5	5	5	5
4	Alat Panen	5	5	5	5
5	Botol Kemasan	50	50	50	50

Sumber Data : Balai TNBT 2021

Jumlah bantuan diatas disamakan jumlahnya untuk dibagikan ke setiap KTH-KTH binaan sehingga dinilai lebih merata.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat suku talang mamak di zona tradisional ini telah berlangsung selama 3 tahun. Setelah di lakukan pelatihan budidaya kelulut pada akhir tahun 2018, secara umum produksi madu pada setiap KTH sampai pada caturwulan kedua cenderung mengalami penurunan kecuali di KTH bomban Berduri. Sebagai contoh, KTH jelemu bengayouan mengalami penurunan sebesar 75% pada catur wulan kedua.

Berdasarkan hasil monitoring tersebut menunjukan bahwa permasalahan sebenarnya lebih bersifat non teknis, yaitu kurangnya partisipasi anggota KTH dalam berbudidaya kelulut. Meskipun kondisi hutan mendukung untuk berbudidaya kelulut karna masih berupa kawasan hutan, partisipasi anggota KTH merupakan hal terpenting dalam kesuksesan budidaya kelulut.

Fenomena penurunan produksi madu yang terjadi pada caturwulan kedua menjadi dasar bagi Balai TNBT untuk kembali melakukan kegiatan pelatihan lanjutan. Pada pelatihan lanjutan ini memfokuskan pada kegiatan perbaikan aspek teknis budidaya kelulut dan pengelolaan diversifikasi produk-produk turunan lebah madu. Pada kegiatan perbaikan aspek teknis budidaya kelulut, kegiatan lebih di tekankan kepada pencarian solusi terhadap permasalahan yang ada. Kegiatan yang bersifat praktek lebih di tekankan pada aspek teknis ini. Misalnya adalah masalah kotak eram (*topping*) yang belum di huni dan berisi kantung madu dapat diatasi dengan melakukan praktek pemancingan dan pemotongan log asal.

Permasalahan lain adalah bagaimana teknis memecah koloni dan mendapatkan koloni dari alam tanpa menebang pohon. Pada aspek pengenalan diversifikasi produk, para anggota KTH di perkenalkan produk turunan lebah madu yang bahannya dari kelulut yang mereka ternakan. Seperti sabun propolis, sabun madu dan madu formula. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menjadikan KTH-KTH ini tidak hanya bergantung pada produk berupa madu, tetapi juga memberikan nilai tambah sehingga akan lebih mudah di kenal oleh masyarakat umum.

Kegiatan pelatihan kedua yang di lakukan pada bulan Oktober 2019 ini memberikan hasil yang baik. Hal ini terlihat dari produktivitas panen madu kelulut yang meningkat pada caturwulan ketiga. Peningkatan tertinggi terjadi pada KTH Bombam Berduri yang mengalami kenaikan sebesar 85,5% jika di bandingkan dengan hasil panen madu pada caturwulan kedua (Gambar 1.D).

Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pelatihan ini efektif dalam memberikan pengaruh terhadap meningkatnya produksi madu kelulut. Kecenderungan positif ini terus terjadi pada caturwulan pertama di tahun 2020 di hampir seluruh KTH kecuali KTH batu Berdiri yang mengalami penurunan. Sedangkan KTH Bombam Berdiri belum di peroleh data panen pada periode ini (Gambar 1.D).

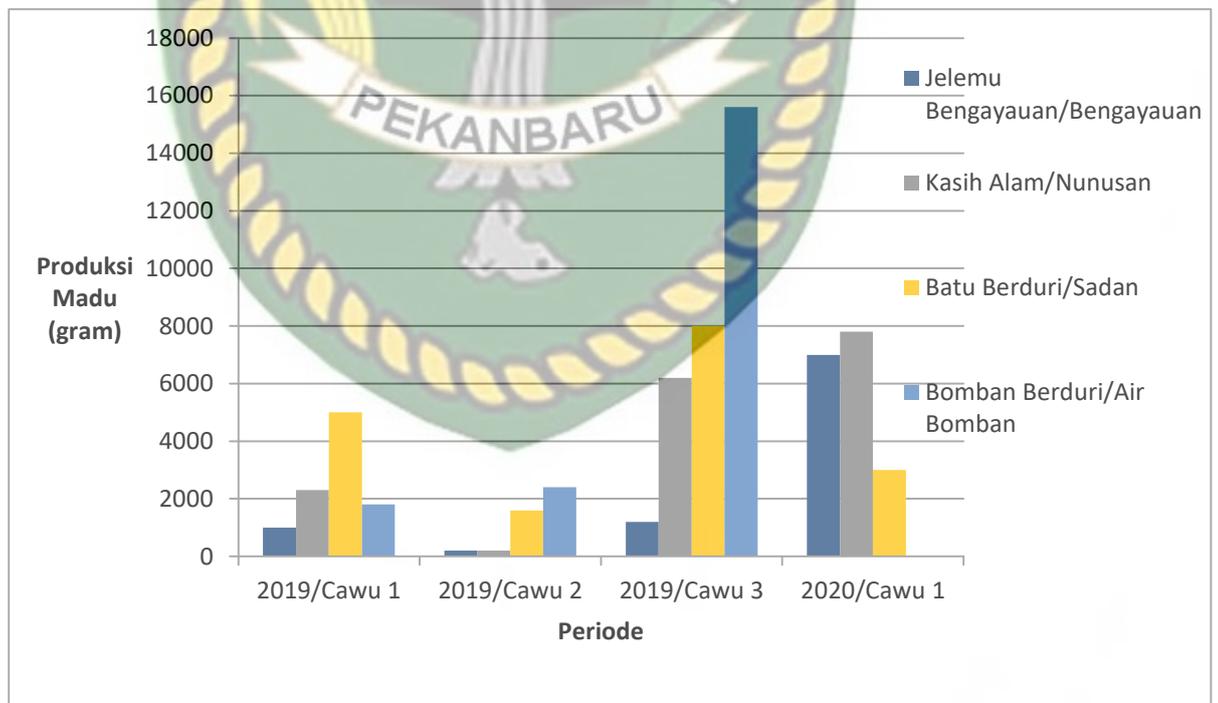
Balai TNBT menerapkan mekanisme satu harga untuk menyamakan harga madu kelulut yang di produksi oleh KTH-KTH binaan mereka. Pada tahun 2019, pihak Balai TNBT menetapkan harga Rp. 50.000 untuk satu botol madu ukuran 200 gram. Pada tahun pertama, KTH batu berdiri menjadi KTH yang berhasil memperoleh pendapatan terbanyak di banding KTH lainnya, yaitu sebesar Rp. 3.587.500. Hal yang menarik terjadi pada KTH Jelemu Bengkayang yang menunjukkan peningkatan pendapatan yang signifikan. Pada tahun 2019, KTH ini hanya berhasil mengumpulkan pendapatan sebesar Rp. 550.000 dan mengalami peningkatan lebih dari tiga kali lipat hanya pada caturwulan pertama tahun 2020, yaitu sebesar Rp. 1.750.000. Hal ini menunjukkan hasil panen madu kelulut mengalami perkembangan yang sangat baik jika di lihat dari penghasilan yang di peroleh.

Meskipun jumlah pendapatan terlihat kecil, akan tetapi hal ini memberikan gambaran dan perubahan sikap masyarakat suku talang mamak. Selama ini masyarakat Suku Talang Mamak lebih banyak bergantung pada hasil alam melalui usaha pemungutan hasil alam dan hanya sedikit mengenal kegiatan berladang seperti bercocok tanam padi dan ketela pohon. Pada awalnya melakukan budidaya

kelulut tidak pernah terpikirkan oleh masyarakat suku Talang Mamak untuk di laksanakan oleh mereka karna untuk kebutuhan madu mereka dapat di penuhi dengan cara berburu madu hutan sialang meskipun jumlahnya terbatas dan semakin menurun serta kegiatan tersebut hanya terbatas karna memerlukan kemampuan tertentu dan kecenderungan produksinya terus menurun akibat dari luas hutan yang semakin berkurang.

Untuk melihat perkembangan yang terjadi kepada KTH-KTH binaan khususnya yang berada di kawasan tradisional terdapat peningkatan yang lumayan signifikan terhadap KTH binaan untuk dan dapat dilihat serta digambarkan pada grafik yang ada pada penjelasan sebagai berikut :

Gambar 1.I : Grafik Perkembangan Produksi Madu Kelulut selama periode 2019-2020



Sumber Data : Balai TNBT 2021

Ketika kegiatan budidaya kelulut ini mulai menunjukkan hasil, hal ini menjadi pemicu dan meyakinkan mereka bahwa ada alternatif pendapatan lain yang apabila di tekuni akan memberikan hasil yang baik dan tidak perlu menuntut mereka untuk masuk ke hutan terutama ketika produksi jernang dan kelukup semakin sedikit.

Keberadaan budidaya kelulut ini mampu memberikan tambahan penghasilan di luar apa yang sudah mereka dapatkan dari alam baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan memanfaatkan jasa lingkungan yang di sediakan oleh hutan. Kemudahan perawatan, harga madu yang relatif lebih mahal dan tidak perlu menunggu lama dalam memperoleh hasil menjadi tiga alasan utama kenapa masyarakat Suku Talang Mamak lebih memilih budidaya kelulut.

Beberapa tantangan dari kegiatan pemberdayaan masyarakat ini adalah lokasi dusun yang jauh dari akses kendaraan karena sebagian besar harus menggunakan sampan bermesin yang juga sangat bergantung pada debit air sungai Batang Gansal. Tantangan kedua adalah sebagian besar masyarakat suku Talang Mamak tidak bisa baca dan tulis sehingga penyampaian materi budidaya kelulut di tekankan kepada kegiatan yang bersifat dialog dan praktek, sedangkan pemberian materi dengan menggunakan media pembelajaran Ms. Power Point sangat sedikit di berikan. Tantangan selanjutnya adalah tingkat antusias masyarakat Suku Talang Mamak yang masih rendah.

Hal ini terlihat ketika di lakukan proses pembelajaran masih banyak peserta pelatihan yang malu dan kurang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran.

Tantangan keempat adalah kurang fokusnya masyarakat dalam melakukan budidaya kelulut.

Terlihat dari beberapa bulan terakhir banyak koloni yang tidak terawat dikarenakan banyak masyarakat yang mencari damar ke hutan. Meskipun demikian, setelah 1 tahun melakukan kegiatan ini, tingkat partisipasi masyarakat meningkat karena mereka dapat melihat langsung hasil dari budidaya kelulut sehingga budidaya ini memiliki peluang yang baik untuk lebih dikembangkan terutama pada masa pandemi Covid-19 seperti saat ini masyarakat membutuhkan madu sebagai asupan untuk memperkuat imunitas tubuh.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah di sajikan serta telah didukung beberapa data dan fakta yang ada, penulis menarik beberapa fenomena yang akan menjadi dasar dari penelitian yang akan di lakukan. Di antaranya sebagai berikut :

1. Masih kurangnya kebiasaan merawat dan menjaga peralatan yang telah di berikan pihak Balai TNBT oleh masyarakat Suku Talang Mamak .
2. Masih terbatasnya masyarakat yang sadar untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui budidaya kelulut.
3. Kurang menguasai teknik budidaya madu kelulut oleh anggota Kelompok Tani Hutan.
4. Keterbatasan akses jalan, komunikasi yang berdampak pada pemasaran hasil produksi madu kelulut.

Berhubungan dengan permasalahan di atas yang telah di dukung dengan fakta-fakta di lapangan yang menggambarkan bahwa masih kurang maksimal

pelaksanaan Balai TNBT terhadap beberapa hal mengenai program pemberdayaan masyarakat suku talang mamak dalam budidaya madu kelulut. Berdasarkan teori dan kasus yang ada di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu).”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian fakta terhadap program pemberdayaan masyarakat suku talang mamak dalam budidaya kelulut. Maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu).?
2. Apa saja faktor penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu).?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis :
 - a. Bagaimana Implementasi Program Pemberdayaan masyarakat Suku Talang Mamak di Kawasan TNBT Dalam Budidaya Madu Kelulut.
 - b. Apa saja hambatan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak di Kawasan TNBT Dalam Budidaya Madu Kelulut.
2. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :
 - a. Guna teoritis, yakni penelitian diharapkan dapat memacu perkembangan Ilmu Administrasi Publik, minimal dapat memperkaya inventaris hasil-hasil penelitian administrasi, khususnya di bidang Implentasi Kebijakan.
 - b. Guna akademis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan yang ingin meneliti hal yang sama.
 - c. Guna praktis, adalah penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pejabat struktural pada Balai TNBT.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam upaya memecahkan masalah penelitian ini, maka penulis mencoba mengemukakan dan menindak pada teori yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sehingga dalam hal tersebut diharapkan dapat memberikan dasar dan arahan bagi penelitian yang dilakukan.

1. Konsep Administrasi

Secara etimologis, Wirman Syafri (2012:3) administrasi berasal dari bahasa Latin *ad* dan *ministrar*, yang berarti “membantu, melayani, atau memenuhi”, serta *administration* yang berarti “pemberian bantuan, pemeliharaan, pelaksanaan, pimpinan dan pemerintahan, pengelolaan”.

Definisi administrasi yang secara implisit menggambarkan keseluruhan dimensi itu dirumuskan oleh The Liang Gie (1993:13) dalam (Zulkifli 2009:13) administrasi merupakan segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu.

Beddy Irawan (2017:25) mengatakan di Indonesia administrasi merupakan kegiatan dengan bantuan berbagai sumber daya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sering didefinisikan dalam artian sempit. Oleh karena itu dijelaskan juga administrasi dalam arti “sempit” maupun “luas” sebagai berikut :

1. Adminstrasi dalam arti sempit
Adminsitration khususnya di Indonesia sering di maknai dengan kegiatan “tuliskan-menuliskan” “catat-mencatat””mengetik” “surat-menyurat”, yaitu suatu proses kegiatan yang berkaitan dengan pengiriman informasi secara tertulis di mulai dari penyusunan, penulisan hingga pengiriman informasi dan sampai kepada pihak yang telah dituju.

2. Administrasi dalam arti luas
Sebagai proses kerja sama saat penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang secara bersama-sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif.

Menurut Sondang P. Siagian (Beddy Irawan (2017:28) administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Menurut Atmosudirdjo (Zulkifli 2009:10) terpaksa harus merumuskan ragam pengertian untuk menerangkan lingkup konsep adminsitration yaitu :

1. Administrasi sebagai fungsi atau kegiatan (activity) adalah seperangkat kegiatan-kegiatan yang tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin serta mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana suatu urusan atau usaha dan sekaligus apa yang berlangsung di dalamnya.
2. Organisasi modern sebagai badan, adalah organisasi yang mempunyai konsultasi dan statula yang tertentu sehingga jenis apa yang menjadi maksud (purpose) dan tujuan-tujuannya (goals), usahanya, sumber pendanaannya (financial resource), serta langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mencapai tujuan-tujuannya.
3. Setiap organisasi modern dikepalai (yang bertugas dan bertanggungjawab) dan dipimpin (yang menggerakkan secara terarah dan bertujuan) administrator.
4. Administrator bisa perorangan bisa suatu dewan.
5. Administrator menunaikan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya melalui apa yang disebut administrasi.

Zulkifli (2009/;12-13) menjelaskan memandang kerjasama manusia mencapai tujuan sebagai objek studi ilmu administrasi, maka terdapat sepuluh dimensi penting yang perlu dipahami dalam konsep administrasi (Atmosudirjo:2003:51-

1. Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu dalam masyarakat modern. Eksistensi daripada administrasi berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi terdapat dalam suatu organisasi.
2. Administrasi merupakan suatu hayat atau kekuatan yang memberikan hidup atau gerak kepada suatu organisasi. Tanpa administrasi yang sehat maka organisasi tidak akan sehat pula. Pembangkit administrasi sebagai suatu kekuatan atau energy atau hayat adalah administrator yang harus pandai menggerakkan seluruh sistem yang terdiri atas para manajer, staffer, dan personil lainnya.
3. Administrasi merupakan suatu fungsi tertentu untuk mengendalikan, menggerakkan, mengembangkan, dan mengarahkan suatu organisasi yang dijalankan oleh administrator dibantu oleh bawahannya, terutama para manajer dan staffer.
4. Adminsitrasi merupakan suatu kelompok orang-orang yang secara bersama-sama merupakan 'badan pimpinan' dari pada suatu organisasi.
5. Administrasi merupakan suatu seni (art) yang memerlukan bakat, ilmu, pengetahuan, dan pengalaman.
6. Administrasi merupakan suatu proses penyelenggaraan bersama atau proses kerjasama antara sekelompok orang-orang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang telah ditentukan dan direncanakan sebelumnya. Kerjasama orang-orang tersebut berlangsung secara dan melalui organisasi.
7. Administrasi merupakan suatu jenis tingkah laku atau sikap kelakuan sosial yang tertentu (administrative behavior or administration as special type of social behavior) yang memerlukan sikap dan mental tertentu serta merupakan suatu tipe tingkah laku manusia tertentu (special type of human behavior).
8. Administrasi merupakan suatu teknik atau praktek yang tertentu. Suatu tatacara yang memerlukan kemampuan atau mengerjakan sesuatu, yang memerlukan kemampuan, kemahiran, keterampilan (skill) yang hanya dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan.
9. Administrasi merupakan suatu sistem tertentu, yang memerlukan input, transformasi, pengolahan dan output tertentu.
10. Administrasi merupakan suatu tipe manajemen tertentu yang merupakan "overall management" dari pada suatu organisasi. Pada hakikatnya manajemen merupakan pengendalian dari sumberdaya-sumberdaya menuju ketercapaian suatu prapta (objective) tertentu. Sumberdaya-sumberdaya (resource) dimaksud meliputi : orang-orang (man), uang (money), mesin-mesin (machines), bahan atau peralatan (materials), metode-cara-teknik (methods-technology), ruang (space).

2. Konsep Organisasi

Dalam bahasa latin Beddy Irawan (2017:35) organisasi adalah organum yang berarti alat, bagian bagian anggota badan (Usman, 2006:141). Pengertian lain,

organisasi berasal dari kata *organizare* yang berarti mengatur atau menyusun (Sulistiyorini, 2006:126). Pengertian dari organisasi tersebut, akan organisasi dapat dipahami sebagai tempat penyusunan dan pengaturan dari berbagai sehingga merupakan kesatuan kerja sama yang teratur untuk mencapai tujuan.

Syamsir Torang (2013:25) mengatakan organisasi adalah sistem peran, aliran aktivitas dan proses (pola hubungan kerja) dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksana tugas yang di disain untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Siagian (Zulkifli (2009:78) mendefinisikan organisasi sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan sesorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.

Pemahaman Stephen P. Robbins (Beddy Irawan (2017:38) organisasi diartikan sebagai kesatuan sosial yang di koordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan.

Menurut Kast dan Rosenzweigh (Beddy Irawan 2017:41) memahami organisasi sebagai suatu subsistem dari lingkungan yang lebih luas. Selanjutnya ia berpendapat bahwa suatu organisasi harus memuat sekurang-kurangnya empat unsur, yaitu :

1. Tujuan organisasi adalah pernyataan tentang keadaan yang diinginkan dimana organisasi bermaksud untuk merealisasikan tujuan. Tujuan merupakan titik akhir dari apa yang diharapkan atau dicapai dalam organisasi.

2. Kerjasama organisasi dapat diartikan kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang dan saling bantu-membantu dengan sesama anggota organisasi lainnya untuk mencapai tujuan bersama.
3. Struktur adalah susunan komponen-komponen (unit-unit) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda tersebut di koordinasikan. Struktur dalam organisasi formal dinyatakan dalam peta organisasi, posisi, dan uraian pekerjaan, serta di peraturan dan prosedur.
4. Teknik diartikan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif maka orang-orang yang bekerja sama tersebut perlu dibekali pengetahuan dan keahlian yang dibutuhkan (dengan pendidikan dan latihan), serta peralatan dan fasilitas (seperti gedung perkantoran, peralatan kantor, kendaraan, anggaran, tanah dan barang modal lainnya).
5. Psikososial atau jiwa sosial. Organisasi juga mempunyai subsistem psikososial yang terdiri dari orang-orang dan kelompok yang berinteraksi serta saling dipengaruhi oleh perasaan, nilai-nilai, sikap, harapan, dan aspirasi dari orang-orang dalam organisasi itu.

Menurut Siagian (Zulkifli (2009:81) minimal terdapat sepuluh faktor utama dari aspek lingkungan yang menuntut agar organisasi secara periodik dan sistematis melakukan peninjauan ulang (pembaharuan) setiap perihal pendekatan atau kebijakan yang telah ditetapkan, faktor-faktor yang dimaksud meliputi :

1. Tantangan utama masa depan
2. Perubahan konfigurasi keternagakerjaan
3. Tingkat pendidikan para pekerja
4. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
5. Situasi ekonomi
6. Berbagai kecenderungan sosial
7. Faktor geopolitik
8. Persaingan
9. Dinamika kebijakan penguasa
10. Pelestarian lingkungan.

Ilmu administrasi bertujuan untuk mendukung upaya para administrator meningkatkan efektifitas dan efisiensi pencapaian setiap tujuan yang telah ditetapkan. Berhubung organisasi merupakan salah satu aspek studi administrasi, maka dapat ditafsirkan bahwa prinsip-prinsip administrasi dan prinsip-prinsip organisasi ibarat dua sisi mata uang. Yang artinya untuk mencapai hasil kerja

yang optimal, para adminsitratir harus mengimplementasikan prinsip-prinsip administrasi dan prinsi-prinsip organisasi secara terintegritas dan berimbang.

3. Konsep Manajemen

Menurut George R. Terry & Leslie W. Rue (Beddy Iriawan 2017:79) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. “managing” mengelola sedang pelaksanaanya disebut manager atau pengelola.

Menurut Donnely, et.al (Beddy Iriawan 2017:79) “management is the process undertaken by one or more individuals to coordinate the activities of other achieve results not achieve by one individual acting alone” (manajemen dipahami sebagai proses yang dilakukan oleh satu atau beberapa individu untuk mengoordinasikan kegiatan orang lain untuk mencapai hasil yang tidak dapat dicapai ole satu individu bertindak sendirian).

Manajemen dapat disimpulkan bahwa suatu proses kegiatan, yaitu merupakan suatu ranglaian altivitas pengelola yang dilakukan terus-menerus oleh manajer atau administrator, yang dimulai dari kegiatan merencanakan, melaksanakan serta mengoordinasikan apa yang telah direncanakan sampai kepadakegiatan pengawasan agar bekerja sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Beishline (Manullang 2001:19:20) ada tiga cara memecahkan persoalan, maka dari itu manajemen digolongkan kedalam tiga kelas, yaitu :

1. Manajemen konvensional, yaitu manajemen tradisional atau manajemen untung-untungan, maksudnya bahwa manajer dalam menghadapi suatu persoalan, dengan cara mendasarkan diri kepada tindakan-tindakan yang diambil di zaman lampau, jadi selalu mendasarkan dirinya atas tradisi.
2. Manajemen sistematis, yaitu dapat dianggap sebagai langkah pertengahan antara manajemen konvensional dan manajemen yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Disini, manajer memecahkan suatu persoalan bukan mendasar pada pengalaman tetapi pada pengalaman orang lain yang menghadapi masalah serupa.
3. Manajemen ilmu pengetahuan, yaitu harus menetapkan langkah-langkah sebelum mengambil keputusan yaitu dengan mengumpulkan data-data, menganalisa data-data, mempertimbangkan tujuan dengan hubungan dari data-data yang sudah terkumpul, kemudian menetapkan apa yang menjadi keputusan.

Menurut Rue dan Byars, Fremont E. Kast dan James E. Rosenzweig, bahwa Henri Fayol adalah orang pertama yang mengidentifikasi fungsi manajemen yang merupakan hal penting dalam keberhasilan berorganisasi, yaitu terdiri dari :

1. Planning (perencanaan) adalah kegiatan-kegiatan penetapan rencana yang dapat dicapai organisasi
2. Organizing (pengorganisasian) adalah kegiatan memobilisasikan sumber-sumber daya manusia dan material organisasi
3. Commanding (kepemimpinan) adalah kegiatan memotivasi dan memengaruhi para pekerja dalam melakukan pekerjaannya.
4. Coordinating (koordinasi) adalah kegiatan menyerasikan sumber daya dan kegiatan-kegiatan organisasi.
5. Controlling (pengawasan) adalah kegiatan memonitor, apakah kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut The Liang Gie (Zulkifli (2009:18) manajemen suatu sub konsep tata pimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai. Dia juga mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses memiliki esensi fungsi utama yaitu :

1. Perencanaan adalah kegiatan yang menentukan hal-hal yang harus dikerjakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan serta bagaimana cara-cara mengerjakannya.

2. Pembuatan keputusan adalah kegiatan yang melakukan pemilihan diantaranya berbagai kemungkinan untuk menyelesaikan masalah, perselisihan, keraguan yang timbul dalam kerjasama.
3. Pengarahan, adalah kegiatan membimbing bawahan dengan jalan memberikan perintah, memberikan petunjuk, mendorong semangat kerja, menegakkan disiplin, memberikan teguran, dan lain usaha semacam itu agar mereka dalam melakukan pekerjaan mengikuti arah yang telah ditetapkan.
4. Pengkoordinasian adalah kegiatan menghubungkan orang-orang dan tugas-tugas sehingga terjamin adanya kesatuan atau keselarasan keputusan, kebijaksanaan, tindakan, langkah, sikap serta mencegah timbulnya pertentangan, kekacauan, kekembaran, dan kekosongan tindakan.
5. Pengontrolan adalah kegiatan yang mengusahakan agar pelaksanaan pekerja serta hasil kerja sesuai dengan rencana, perintah, petunjuk atau ketentuan-ketentuan ditetapkan.
6. Penyempurnaan adalah kegiatan memperbaiki segenap segi penataan agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efisien.

Dari batasan manajemen tersebut diisyaratkan bahwa manajemen terdiri dari beberapa rangkaian kegiatan yang terintegritas sebagai satu kesatuan utuh. Untuk menjabarkan secara baik dari setiap fungsi tersebut dalam suatu kerjasama mencapai sasaran organisasi. Maka kepada setiap perumusan kebijakan dan pelaksanaannya juga dituntut memiliki pengetahuan dan keahlian yang spesifik.

Siagian (Zulkifli (2009:19-20) merumuskan batas manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Manajemen sebagai motor dari suatu sistem administrasi, secara eksplisit terlihat dalam pendapat Waldo (1986:27) manajemen adalah suatu tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu sistem administrasi.

4. Konsep Kebijakan Publik

Istilah kebijakan seringkali penggunaannya saling dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan, dan rencana-rencana besar. Dalam Zainal&Raden (2015:3).

Menurut Widodo dalam Zainal&Raden (2015:10) mengatakan bahwa kebijakan publik dibentuk untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan serta berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah bukan sekedar apa yang ingin dilakukan.

Dalam praktanya, rentetan kebijakan publik sangat banyak, namun secara sederhana dikelompokkan menjadi tiga yang dikemukakan oleh Nugroho dalam Zainal&Raden (2015:11-12) :

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau mendasar.
2. Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjelasan pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, Dan Peraturan Wali Kota.
3. Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparatur publik dibawah menteri, gubernur, bupati, wali kota.

Sementara itu Laswell dalam Dwiyanto (2017:18) menginginkan ilmu kebijakan publik mencakup 1) metode penelitian proses kebijakan, 2) hasil dari studi kebijakan, 3) hasil temuan penelitian memberikan kontribusi paling penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan integensi era kita sekarang. Selain itu Laswell juga menggerakkan dan mendorong agar para analis kebijakan menjadi lebih kreatif dalam mengidentifikasi masalah-masalah kebijakan.

Dengan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah sebagai regulasi revisi atas Undang-Undang No 22 tahun 1999, maka pembagian kewenangan serta pembiayaan kini dilaksanakan oleh pemerintah daerah (pemda) dengan lebih nyata dan riil. Mulai saat itu pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, melaksanakan, serta mengevaluasi kebijakan dan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat daerah setempat. Dalam Leo (2006:1).

5. Konsep Implementasi

Menurut Pressman dan Wildavky dalam Zainal&Raden (2015:50) mengemukakan bahwa “implementasi as to carry out, accomplish, fulfill, produce, complete”. Maksudnya membawa, menyelesaikan, mengisi, dan menghasilkan.

Secara etimologi dalam Zainal&Raden (2015:50) implementasi itu dapat dimaksud sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Sedangkan menurut A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam Zainal&Raden (2015:51) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program, dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminitrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Pendapat Ripley dalam Zainal&Raden (2015:53) mengatakan bahwa implementasi dapat dilihat dari dua perspektif sebagaimana ia jelaskan “implementation studies have two major foci, “complete” and “what happening?”. Perspektif pertama (compliance perspective) memahami keberhasilan implementasi dalam arti sempit yaitu sebagai kepatuhan implementer dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang dalam dokumen kebijakan (dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah atau program). Perspektif kedua memandang keberhasilan implementasi kebijakan bukan hanya dilihat dari aspek kepatuhan implementer (arti sempit) dalam melaksanakan kebijakan berdasarkan standart operating procedure (SOP) semata. Perspektif kedua ini memandang bahwa kepatuhan implementer dalam mengimplementasikan kebijakan merupakan suatu kondisi yang harus dilalui (necessary condition) agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan, bukan tujuan akhir dari implementasi.

6. Konsep Implementasi Kebijakan

Kajian klasik Mazmanian & Sabatier dalam Leo (2020:146) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan biasa dalam bentuk undang-undang, tapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya.

Diungkapkan oleh Lester & Stewart dalam Leo (2020:146-147) keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Grindle yaitu pengukuran keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan apa yang telah ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Menurut Oktasari (2015:1340), Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu to implement yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward dalam Dwiyanto (2017:31-32) menunjuk empat variabel yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi. Empat variabel tersebut yaitu :

1. Komunikasi, yaitu menunjuk bahwa setiap kebijakan akan dapat dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran (target group). Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga menghindarkan adanya distorsi atau kebijakan dan program.
2. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun

kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh anggota kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atau sebuah program/kebijakan.

3. Diposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokratis.
4. Struktur birokrasi, yaitu menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksanaan sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui standar operating prosedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program/kebijakan. Kedua yaitu struktur organisasi pelaksanaan pun sejauh mungkin menghindari hal yang berbelit, panjang, dan kompleks.

Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., (1994: 15) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.

Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Dwiyanto (2017:38-39) menetapkan beberapa variabel yang di yakini dapat mempengaruhi implementasi dan kinerja kebijakan. Beberapa variabel yang terdapat dalam model meter dan horn adalah sebagai berikut :

1. Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.
2. Kinerja kebijakan merupakan penilaian terhadap pencapaian standar dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan di awal.
3. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi program/kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien.

4. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang di rancang untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya: seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat, dan waktu. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan.
 5. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal organisasi.
 6. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
 7. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.
7. Konsep Pemberdayaan

Menurut Djohani dalam Anwas (2013:49) pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerful) sehingga terjadi keseimbangan.

Menurut Parsons dalam Anwas (2013:49) pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang yang menjadi perhatiannya.

Secara rinci Slamet dalam Anwas (2013:49-50) menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat, dan memanfaatkan peluang, benergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif,

mampu menganbil keputusan, nerani mengambi resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak sesuai inisiatif.

Dalam buku Anwas (2013:28-60) pemberdayaan ditujukan agar klien/sasaran mampu meningkatkan kualitas kehidupan untuk berdaya, memiliki daya saing, dan mandiri. Dalam melaksanakan pemberdayaan khususnya kepada masyarakat, agen pemberdayaan perlu memegang prinsip-prinsip pemberdayaan. Mengacu pada hakikat dan konsep pemberdayaan, maka dapat diidentifikasi beberapa prinsip pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

1. Pemberdayaan dilakukan dengan cara demokrasi dan menghindari unsur paksaan. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk berdaya. Setiap individu juga memiliki kebutuhan masalah, bakat, minat, dan potensi yang berbeda. Unsure-unsur pemaksaan melalui berbagai cara perlu dihindari karena bukan menunjukkan cirri dari pemberdayaan.
2. Kegiatan pemberdayaan didasarkan pada kebutuhan, masalah, dan potensi klien/sasaran. Proses pemberdayaan dimulai dengan menumbuhkan kesadaran kepada sasaran akan potensi dan kebutuhannya yang dapat dikembangkan dan diberdayakan unkn mandiri.
3. Sasaran pemberdayaan adalah sebagai subjek atau pelaku dalam kegiatan pemberdayaan. Oleh karena itu sasaran menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan tujuan, pendekatan, dan bentuk aktivitas pemberdayaan
4. Pemberdayaan berarti menumbuhkan kembali nilai, budaya, dan kearifan-kearifan lokal yang memiliki nilai luhur dala masyarakat.
5. Pemberdayaan merupakan sebuah proses yang memerlukan waktu, sehingga dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahapan ini dilakukan secara logis dari sifatnya sederhana menuju yang komplek.
6. Kegiatan pendampingan atau pembinaan perlu dilakukan secara bijaksana, bertahap, dan berkesinambungan. Kesabaran dan kehati-hatian dari agen pemberdayaan perlu dilakukan terutama dalam menghadapi keragaman karakter, kebiasaan, dan budaya masyarakat yang sudah tertanam lama.
7. Pemberdayaan tidak bisa dilakukan dari salah satu aspek saja, tetapi perlu dilakukan secara holistic terhadap semua aspek kehidupan yang ada dalam masyarakat.
8. Pemberdayaan perlu dilakukan terhadap kaum perempouan terutama remaja dan ibu-ibu muda sebagai potensi besar dalam mengdongkrak kualitas kehidupan keluarga dan pengentasan kemiskinan.
9. Pemberdayaan dilakukan agar masyarakat memiliki kebiasaan untuk terus belajar, belajar sepanjang hayat.

10. Pemberdayaan perlu memperhatikan adanya keragaman budaya. Oleh karena itu diperlukan berbagai metode dan pendekatan pemberdayaan yang sesuai dengan kondisi lapangan.
11. Pemberdayaan diarahkan untuk menggerakkan partisipasi aktif individu dan masyarakat seluas-luasnya. Partisipasi ini dimulai dari tahapan perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, evaluasi, termasuk partisipasi dalam menikmati hasil dari aktivitas pemberdayaan.
12. Klien/sasaran pemberdayaan perlu ditumbuhkan jiwa kewirausahaan sebagai bekal menuju kemandirian.
13. Agen pemberdayaan atau tugas yang melaksanakan pemberdayaan perlu memiliki kemampuan (kompetensi) yang cukup, dinamis, fleksibel dalam bertindak, serta dapat mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat. Agen pemberdayaan ini lebih berperan sebagai fasilitator.
14. Pemberdayaan perlu melibatkan berbagai pihak yang ada dan terkait dalam masyarakat, mulai dari unsure pemerintah, tokoh, guru, kader, ulama, pengusaha, LSM, relawan dan anggota masyarakat lainnya. Semua pihak tersebut dilibatkan sesuai peran, potensi, dan kemampuannya.

B. Kerangka Berpikir

Kerangka pikir ini semua yang termasuk dalam cakupan kajian, baik secara teoritis, konsep, maupun lingkup bahasan kajian Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu). sehingga kerangka pikir penelitian ini adalah sebagai berikut.

Gambar II.1 : Kerangka Pikir Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu).



Sumber : Data olahan penulis 2021

C. Konsep Operasional

Konsep merupakan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Untuk memudahkan penganalisaan dan tidak mengaburkan konsep agar tujuan penelitian dapat tercapai maka penulis merasa perlu membatasi dan mengoprasionalkan konsep-konsep yang dipakai, konsep-konsep tersebut antara lain yaitu :

1. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah wadah untuk memfasilitasi proses kerja sama untuk pencapaian suatu tujuan tertentu.
3. Manajemen adalah suatu proses di mana seseorang dapat mengatur segala sesuatu yang dikerjakan oleh individu atau kelompok.
4. Implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.
5. Standar dan sasaran kebijakan, standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara

spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan.

6. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan finansial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan. Hal sulit yang terjadi adalah berapa nilai sumber daya (baik finansial maupun manusia) untuk menghasilkan implementasi kebijakan dengan kinerja baik. Evaluasi program/kebijakan seharusnya dapat menjelaskan nilai yang efisien.
7. Komunikasi antar badan pelaksana, menunjuk kepada mekanisme prosedur yang di rancang untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Komunikasi ini harus ditetapkan sebagai acuan, misalnya: seberapa sering rapat rutin akan diadakan, tempat, dan waktu. Komunikasi antar organisasi juga menunjuk adanya tuntutan saling dukung antar institusi yang berkaitan dengan program/kebijakan.
8. Karakteristik badan pelaksana, menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal organisasi.
9. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik, menunjuk bahwa lingkungan dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.
10. Sikap pelaksana, menunjuk bahwa sikap pelaksana menjadi variabel penting dalam implementasi kebijakan. Seberapa demokratis, antusias dan

responsif terhadap kelompok sasaran dan lingkungan beberapa yang dapat ditunjuk sebagai bagian dari sikap pelaksana ini.

D. Operasional Variabel

Operasional Variabel dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variabel, indikator, item penilaian, dan skala yang direncanakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Konsep variabel dari Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak di Kawasan TNBT Dalam Budidaya Kelulut ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel II.1 : Operasionalisas Variabel penelitian tentang Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak di Kawasan TNBT Dalam Budidaya Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu)

Konsep 1	Variabel 2	Indikator 3	Item Penilaian 4	Skala 5
Van Meter dan van Horn yang dikutip oleh Parsons (1995: 461) dan Wibawa, dkk., (1994: 15) bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta baik secara	Implementasi	1. Standar dan Sasaran	a. Penentuan Kriteria Penerima Program b. Penetapan target hasil produksi madu yang hendak dicapai melalui program c. SOP (Standart OperationaProced ure)	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana • Cukup Terlaksana • Tidak Terlaksana
		2. Sumber Daya	a. Sumber Daya Manusia b. Sarana dan Prasarana c. Ketersedian dana	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana • Cukup Terlaksana • Tidak Terlaksana
		3. Komunikasi Antar Organisasi	a. Sosialisasi Tentang Program b. Keterkaitan dengan	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana • Cukup Terlaksana • Tidak Terlaksana

individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan.			Pemerintah Desa dan Instansi lainnya	
	4. Karakteristik Pelaksana	a. Jelasnya fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana b. Tingkat komitmen dan kejujuran pelaksana c. Fasilitator penyelesaian masalah		<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana • Cukup Terlaksana • Tidak Terlaksana
	5. Lingkungan Sosial dan Ekonomi	a. Adanya hubungan baik dengan masyarakat b. Adanya tanggapan positif masyarakat terhadap program c. Pengaruh program terhadap masyarakat		<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana • Cukup Terlaksana • Tidak Terlaksana
	6. Sikap Pelaksana	a. Pemahaman dan pendalaman program b. Masyarakat ikut berpartisipasi dalam program c. Kemampuan melakukan pengembangan program		<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksana • Cukup Terlaksana • Tidak Terlaksana

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

E. Teknik Pengukuran

Untuk mempermudah menganalisa data, maka penelitian terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini di klasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori yaitu, terlaksana. Cukup terlaksana dan Tidak Terlaksana. Adapun teknik yang di gunakan dalam variabel penelitian adalah sebagai berikut :

- Terlaksana : Apabila Hasil indikator variabel penelitian dalam rentang persentase 76%-100% .
- Cukup Terlaksana : Apabila Hasil indikator variabel penelitian dalam rentang persentase 34%-66%
- Tidak Terlaksana : Apabila Hasil indikator variabel penelitian dalam rentang persentase 1%-34%

Adapun pengukuran Indikator sebagai berikut :

1. Standar dan Sasaran, dikatakan dengan kategori sebagai berikut :

- Terlaksana : Apabila Hasil indikator variabel penelitian dalam rentang persentase 76%-100%
- Cukup Terlaksana : Apabila Hasil indikator variabel penelitian dalam rentang persentase 34%-66%
- Tidak Terlaksana : Apabila Hasil indikator variabel penelitian dalam rentang persentase 1%-34%

2. Sumber Daya, dikatakan dengan kategori sebagai berikut :

- Terlaksana : Apabila Hasil indikator variabel penelitian dalam rentang persentase 76%-100%
- Cukup Terlaksana : Apabila Hasil indikator variabel penelitian dalam

rentang persentase 34%-66%

Tidak Terlaksana : Apabila Hasil indikator variabel penelitian dalam rentang persentase 1%-34%

3. Komunikasi antar organisasi, dikatakan dengan kategori sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila Hasil indikator variabel penelitian dalam rentang persentase 76%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila Hasil indikator variabel penelitian dalam rentang persentase 34%-66%

Tidak Terlaksana : Apabila Hasil indikator variabel penelitian dalam rentang persentase 1%-34%

4. Karakteristik Pelaksana, dikatakan dengan kategori sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila Hasil indikator variabel penelitian dalam rentang persentase 76%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila Hasil indikator variabel penelitian dalam rentang persentase 34%-66%

Tidak Terlaksana : Apabila Hasil indikator variabel penelitian dalam rentang persentase 1%-34%

5. Lingkungan social dan ekonomi, dikatakan dengan kategori sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila Hasil indikator variabel penelitian dalam rentang persentase 76%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila Hasil indikator variabel penelitian dalam rentang persentase 34%-66%

Tidak Terlaksana : Apabila Hasil indikator variabel penelitian dalam



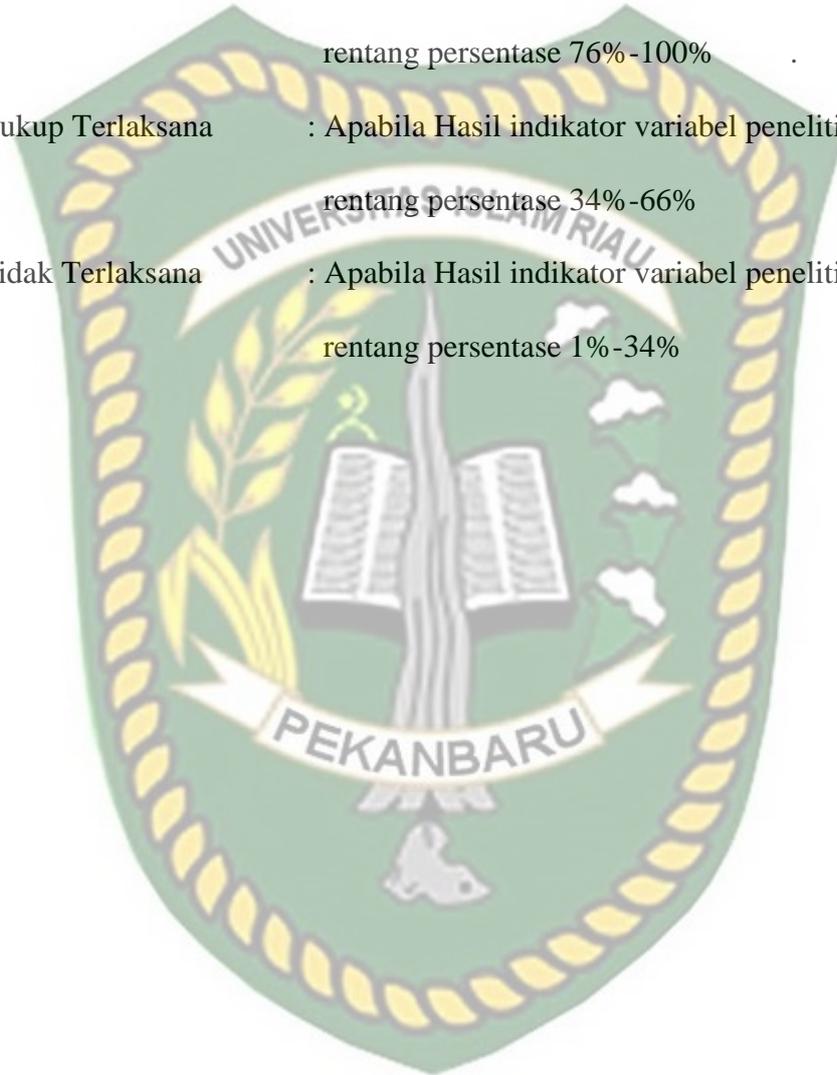
rentang persentase 1%-34%

6. Sikap Pelaksana, dikatakan dengan kategori sebagai berikut :

Terlaksana : Apabila Hasil indikator variabel penelitian dalam rentang persentase 76%-100% .

Cukup Terlaksana : Apabila Hasil indikator variabel penelitian dalam rentang persentase 34%-66%

Tidak Terlaksana : Apabila Hasil indikator variabel penelitian dalam rentang persentase 1%-34%



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian adalah deskriptif. Karena peneliti bermaksud untuk mengetahui hasil analisa dan informasi yang detail terhadap pada objek penelitian. Peneliti deskriptif bertujuan untuk menggambarkan keadaan sesungguhnya atau yang sebenarnya tentang bagaimanakah Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak di Kawasan TNBT dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu).

Kemudian metode yang digunakan didalam penyusunan penelitian ini yaitu metodologi kuantitatif. Hal ini dikarenakan metode penelitian kuantitatif menurut Sugiono (2013, hal, 16) dapat diartikan sebagai penelitian didasarkan pada filsafat positivesme, dan digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah penelitian yang berlokasi di Kawasan Konservasi Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, bertujuan sebagai bentuk analisa kegiatan Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, sebagai lembaga yang mengelola kawasan konservasi dengan tujuan pemanfaatan sebagai tempat pemberdayaan masyarakat lokal Suku Talang Mamak. Adapaun sebagai pertimbangan objek penelitian yaitu berdasarkan

fenomena yang ada karena di kawasan Konservasi yakni Desa Rantau Langsat Sendiri adalah sebuah desa yang memiliki potensi alam yang begitu banyak dan adanya suku lokal talang mamak yang membutuhkan pengelolaan yang baik oleh instansi terkait melalui program pemberdayaan masyarakat yang telah di buat .

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiono (2013, hal, 90) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. populasi bukan hanya sekedar orang tapi juga objek dan benda-benda yang dimiliki oleh subjek tersebut.

Berdasarkan pengertian diatas maka populasi penelitian ini adalah, Kepala SPTN Wilayah II Belilas, Bagian Program dan Kerja Sama, Tenaga Ahli BP2TSTH, Pendamping Kelompok Tani Hutan, Kepala Desa, Ketua Kelompok Tani Hutan dan Anggota-Anggota Kelompok Tani Hutan binaan.

2. Sampel

Menurut Sugiono (2013, hal, 91) Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Apabila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, waktu, tenaga dan sebagainya maka peneliti dapat menggunakan sampel itu.

Tabel III.1 : Populasi dan Sampel Penelitian

No	Sub Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala SPTN Wilayah II Belilas	1	1	100%
2	Bagian Program dan Kerja Sama	2	2	100%
3	Pendamping Kelompok Tani Hutan	2	2	100%
4	Tenaga Ahli BP2TSTH	1	1	100%
5	Kepala Desa	1	1	100%
6	Ketua Kelompok Tani Hutan	4	4	100%
7	Anggota Kelompok Tani Hutan	40	20	50%
Jumlah		51	31	-

Sumber : Data Olahan Penulis

D. Teknik Penarikan Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. (Sugiono, 2011; 91).

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Kepala SPTN Wilayah II Belilas, Tenaga Ahli BP2TSTH dan Kepala Desa digunakan teknik sensus yaitu adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Data yang diperoleh tersebut merupakan pengolahan sensus disebut sebagai data yang sebenarnya (*true value*). Atau sering juga disebut parameter.

2. Untuk Bagian Program dan Kerja Sama, Pendamping Kelompok Tani Hutan, Ketua-ketua Kelompok Tani Hutan dan Anggota Kelompok Tani Hutan. penarikan sampel pada kategori ini digunakan Purposive Sampling, yaitu penentuan sampel dengan mempertimbangkan tertentu. Dengan kata lain unit sampel yang dihubungkan sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk melakukan penelitian ini maka perlu diketahui sumber data dalam penelitian, maka yang menjadi sumber data penelitian adalah sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil kuisioner, wawancara dan hasil observasi langsung untuk melihat dan mendapatkan informasi penelitian. Yang berasal dari Responden Kepala SPTN II Wilayah Belilas, Bagian Perencanaan, Tenaga Ahli BP2TSTH, Pendamping KTH, Kepala Desa, Ketua KTH dan Anggota KTH. Data yang ingin diperoleh seperti :

- Tanggapan Responden terhadap kuisioner yang penulis tanyakan tentang Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau).

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diusahakan sendiri pengumpulan oleh peneliti seperti dari berita, internet, buku, jurnal, peneliti terdahulu yang berkaitan dengan masalah peneliti, keterangan-keterangan atau dokumentasi lainnya.

Data sekunder dari peneliti seperti :

- Zonasi kawasan
- Data RPJP balai TNBT tahun 2015-2024
- Data luas pembagian kawasan TNBT
- Data Jumlah KTH
- Data Jumlah Bantuan
- Grafik Pengelolaan, Dll

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Kuesioner

Kuesioner adalah merupakan teknik pengumpulan data dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang paling efisien yang diambil dari responden, kuesioner juga digunakan dalam jumlah responden dengan skala yang cukup besar. Pertanyaan yang diberikan melalui kuesioner berkaitan dengan indikator variabel penelitian.

Cara peneliti menyebarkan angket kepada sampel yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah dengan cara, yaitu penulis kelapangan langsung menemui masyarakat setempat. Kuesinoer ini di isi lansung oleh Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok, Kepala Desa dan Kelompok Masyarakat dalam KTH.

2. Wawancara

Wawancara ini dilakukan kepada Pendamping KTH dari Balai TNBT dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai Program Pemberdayaan masyarakat.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan dengan tatap muka mapun dengan yang lain.

a. Wawancara Terstruktur

Wawancara terstruktur adalah wawancara yang telah disiapkan pertanyaan-pertanyaan tertulis, dengan wawancara terstruktur ini responden diberikan pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatatnya.

b. Wawancara Tidak Terstruktur

Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman saat wawancara. Wawancara ini hanya bertanya berupa garis besar terhadap permasalahan akan ditanyakan.

Peneliti melakkukan wawancara dengan Pendamping KTH.

3. Observasi

Observasi merupakan suatu proses peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari masyarakat setempat yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Data yang diperoleh langsung peneliti melalui hasil pengamatan objek penelitian yang ada dilapangan dalam mengamati program pemberdayaan masyarakat suku talang mamak dikawasan TNBT Peneliti melakukan observasi terhadap objek penelitian yaitu lokasi-lokasi yang dijadikan sebagai tempat penelitian seperti dusun tempat budidaya yang pengelolaannya menjadi masalah. Adapaun data yang dapat penulis dari pelaksanaan observasi adalah menyajikan data terkait fakta yang terjadi dilapangan. Dimana sebelum melakukan penelitian dengan cara mengumpulkan data melalui kuesioner.

4. Dokumentasi

Menurut Sugiono (2016, hal,82) Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sumber-sumber data sekunder yang berhubungan dengan masalah penelitian yang ada di lokasi penelitian yang merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu, dokumentasi dapat berupa tulisan ataupun berita online, dokumentasi eksternal berisi bahan-bahan informasi berupa buku, yang berkaitan dengan tentang penelitian.

Dokumentasi yang peneliti dapatkan dari hasil penelitian adalah seperti kegiatan budidaya madu, dokumentasi penulis dengan responden, dokumentasi degan berkas-berkas pendukung seperti, Zonasi dan

dokumentasi lainnya yang menjadi pelengkap dan membuktikan kebenaran penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang diguakan oleh peneliti adalah metode statistik deskriptif. Menurut Sugiono (2016. Hal. 169) Statistik Deskriptif adadalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi.

Teknik analisa ini juga suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada objek penelitian. Suatu analisa yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan untuk kemudian mengambil kesimpulan yang berlaku pada objek serta disajikan dalam bentuk penelitian yang didasarkan tata cara ilmiah.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Indragiri Hulu

1. Sejarah Singkat Kabupaten Indragiri Hulu

Merujuk kepada undang-undang Nomor 10 Tahun 1948 menjelaskan tentang di bentuknya Kabupaten Indragiri yang termasuk didalam bagian wilayah Provinsi Sumatera Tengah serta secara resminya melalui Surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah pada tanggal 19 november 1948 nomor 10/GM/T.49, selanjutnya juga dengan undang-undang nomor 4 tahun 1952 dan undang-undang nomor 12 tahun 1956 peraturan tentang daerah otonom sumatera tengah dan kabupaten indragiri.

Mengarah lebih lanjut kepada sejarah Kabupaten Indragiri juga tentu tak lepas dari bagaimana terlebih dahulu provinsi Riau terbentuk. Yang mana berdasarkan undang-undang nomor 61 tahun 1958 maka timbulah gagasan mengenai pemekaran untuk kabupaten indragiri menjadi dua kabupaten yang berbeda yakni Kabupaten Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir yang berlandaskan pada undang-undang nomor 6 tahun 1965 yang mana menjelaskan pemekaran untuk dua wilayah kabupaten tersebut yaitu :

- a. Kabupaten Indragiri Hilir dengan ibukotanya Tembilahan serta terdiri dari delapan kecamatan (untuk sekarang 11 kecamatan)

b. Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibu Kota berada di Rengat dan terdiri dari beberapa kecamatan :

- 1) Kecamatan Rengat
- 2) Kecamatan Pasir Penyu
- 3) Kecamatan Seberida
- 4) Kecamatan Peranap
- 5) Kecamatan Kuantan Hilir
- 6) Kecamatan Kuantan Tengah
- 7) Kecamatan Kuantan Mudik
- 8) Kecamatan Singingi

Hingga Pada tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dipecah lagi menjadi dua kabupaten yakni menjadi Kabupaten Kuansing yang berkedudukan di Taluk Kuantan dan Kabupaten Indragiri Hulu yang masih tetap berkedudukan di Kota Rengat. Dan pada tahun 2004 mengalami beberapa perubahan menjadi 14 Kecamatan yakni sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Rengat
- 2) Kecamatan Rengat Barat
- 3) Kecamatan Seberida
- 4) Kecamatan Batang Gansal
- 5) Kecamatan Batang Cenaku
- 6) Kecamatan Pasir Penyu
- 7) Kecamatan Lirik
- 8) Kecamatan Kelayang
- 9) Kecamatan Peranap
- 10) Kecamatan Batang Peranap

- 11) Kecamatan Rakit Kulim
- 12) Kecamatan Sungai Lala
- 13) Kecamatan Lubuk Batu Jaya
- 14) Kecamatan Kuala Cenaku

2. Keadaan Geografis Kabupaten Indragiri Hulu

a. Luas dan Letak Wilayah

Kabupaten Indragiri Hulu memiliki luas wilayah seluas 8.198.26 Km² (819.826,0 Ha) yang terdiri dari daratan rendah dan daratan rendah dengan rata-rata berada pada ketinggian 50-100 m diatas permukaan laut.

b. Batas Wilayah

Batas Wilayah Kabupaten Indragiri Hulu terletak diantara :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bung Tebo (Provinsi Jambi)
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Kuantan Singingi
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Gambaran Umum Desa Rantau Langsat

1. Sejarah Desa Rantau Langsat dan Suku Talang Mamak

Desa Rantau Langsat merupakan salah satu desa dari 10 desa yang ada di Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu yang pada awal berdirinya pada tahun 1830 dulu pernah menjadi bagian dari kerajaan keritang sebagai desa tertua pada masa kerajaan keritang itu pula. Wilayah ini dahulu dipimpin oleh

datuk patih dan dibantu pengawal, Batin adat. Untuk saat ini pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa dengan kurun waktu pada tabel sebagai berikut :

Tabel IV.1 : Nama-Nama Kepala Desa Rantau Langsung Dalam Kurun Waktu

No	Nama Kepala Desa	Masa Jabatan
1	Kedemang	1820 – 1830
2	Patih	1830 – 1870
3	Mak Ajin	1870 – 1910
4	Kontong	1910 – 1935
5	Ugin	1935 – 1955
6	Atan T	1955 – 1964
7	Lalan	1964 – 1967
8	Mak Isan	1967 – 1968
9	Ali	1968 – 1969
10	M.Saleh	1969 – 1985
11	Hamzah	1986 – 1995
12	H.Baharudin	1995 – 2004
13	M.Nasir	2004 – 2014
14	Supno Hatiro	2014 – 2019
15	Jelita Saepudin	2019 – 2021
16	Eka Widya A.Md	2021-Sekarang

Sumber Data : Kantor Desa Rantau Langsung 2021

Desa rantau langsung juga merupakan tempat tinggal salah satu suku tradisional yakni Suku Talang Mamak yang mana ada dua versi tentang asal muasal dari suku talang mamak yang ada tinggal di kawasan desa rantau langsung yang juga termasuk dalam kawasan konservasi Taman Nasional Bukit Tiga Puluh. Versi pertama yang berdasarkan pada penelitian Asisten Residen Indragiri Hulu di zaman belanda, menyebutkan Suku Talang Mamak betrasal dari pagaruyung, sumatera barat. Yang pindah ke daerah indragiri diakibatkan adanya konflik adat dan agama. Versi kedua merupakan cerita yang berasal dari masyarakat adat dan diwariskan secara turn-temurun. Yang mana pada versi ini menceritakan bahwa

Suku Talang Mamak merupakan keturunan Nabi Adam Ketiga yang mana cerita ini diperkuat lagi dengan bukti berupa tapak kaki manusia di daerah sungai Tunu Kecamatan Rakit Kulim, Indragiri Hulu dan jejak tersebut diyakini sebagai tapak kaki tokoh masyarakat adat Suku Talang Mamak.

Dan pada versi lainnya lagi mengatakan bahwa sejarah asal usul Masyarakat Suku Talang Mamak lahir dari cerita rakyat tentang Putri Pinang Masak. Konon, hidup tujuh pasang putra-putri yang lahir kembar di indragiri. Ketujuh Putra menjadi sosok yang gagah berani dan ketujuh putri menjadi gadis yang cantik jelita. Salah satu putri yang cantik ialah Putri Pinang Masak. Untuk mengatur kehidupannya Suku Talang Mamak telah bertumpu pada Adat. Bagi masyarakat Suku Talang Mamak adat adalah tempat teks lisan berupa seperangkat ketentuan dan sanksi (denda dan hukuman) yang dihafal oleh tiap tokoh adat dan diwariskan generasi ke generasi.

2. Keadaan geografis Desa Rantau Langsung

a. Batas dan Luas Wilayah

Batas wilayah desa pada geografi Desa Rantau langsung Terletak di Antara :

Sebelah Utara : Desa Siambul

Sebelah Selatan : Provinsi Jambi

Sebelah Barat : Desa Sanglap

Sebelah Timur : Desa Talang Lakat, Usul dan Keritang

Luas wilayah Desa Rantau Langsat Total : 5.323,5 ha

1. Permukiman : 600 ha
2. Pertanian : 3.490 ha
3. Ladang : 50 ha
4. Hutan : 1.150 ha
5. Rawa-rawa : 0 ha
6. Perkantoran : 1,5 ha
7. Sekolah : 2 ha
8. Jalan : 30 ha

b. Jumlah Penduduk

penduduk merupakan semua orang yang hidup dan berdomisili di suatu daerah dalam lingkup wilayah geografis di suatu wilayah dengan tujuan hidup untuk tinggal dan menetap pada wilayah tersebut, jumlah penduduk Desa Rantau Langsat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.2 : Jumlah Penduduk Desa Rantau Langsat

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	1.320 Jiwa
2	Perempuan	1.223 Jiwa
Total		2.543 jiwa

Sumber Data : Kantor Desa Rantau Langsat 2021

Pada tabel di atas penduduk laki-laki di desa rantau langsung jumlahnya lebih banyak dari pada penduduk perempuan, namun pada masa yang akan datang perubahan mungkin saja terjadi dalam pertumbuhan penduduk di desa Rantau Langsat.

C. Gambaran Umum Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

1. Sejarah Singkat Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

Pada tahun 1995 kawasan Bukit Tiga Puluh ditunjuk sebagai Taman Nasional yang mana bertepatan pada tanggal 5 Oktober 1995 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 539/Kpts-II/95, dengan luas awalnya seluas 127.698 Ha. Luas tersebut juga diambil dari 57.488 Ha hutan produksi terbatas dan 37.250 Ha hutan lindung yang ada di provinsi Riau serta 33.000 Ha hutan lindung di Provinsi Jambi.

Selanjutnya, pada tahun 2002 setelah dilakukan penataan pada batas, Bukit Tiga Puluh barulah resmi ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tanggal 21 Juni 2002 dengan di terbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 6407/Kpts-II/2002 dengan luas kawasan taman nasional seluas 144.223 Ha.

2. Keadaan Geografis Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

a. Luas dan Batas wilayah

TNBT secara geografis terletak pada $0^{\circ} 40'$ - $1^{\circ} 25'$ LS dan $102^{\circ} 30'$ - $102^{\circ} 50'$ BT dengan luas 144.223 Ha. Secara keseluruhan TNBT memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Utara (Riau) : berbatasan dengan beberapa desa yakni desa Rantau Langsat, Sungai Akar, Talang Lakat, Siambul dan Usul.

- Timur (Riau-Jambi) : berbatasan dengan hutan produksi dan beberapa desa seperti desa Keritang, Batu Ampar, Selensen, Suban, Labuhan Dagang, Merlung dan Kampung Baru.
- Selatan (Jambi) : berbatasan dengan areal IUPHHKT (PT.WKS), kawasan eks. HPH PT. Dalek Hutani Esa dan beberapa desa seperti Desa Suo-Suo, Semambu, Muaro Sekalo dan Dusun Semerantihan.
- Barat (Riau) : berbatasan dengan areal IUPHHKT (PT. RAPP) dan beberapa desa seperti Desa Puntianai, Sipang, Alim, Batu Papan dan Aur Cina.

3. Program Pemberdayaan Untuk Masyarakat Di Kawasan TNBT

a. Kemitraan Konservasi

Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh pihak Balai TNBT selaku pihak yang berwenang atas pelaksanaan seluruh program yang hendak dilakukan pada kawasan TNBT. Program ini berlandaskan pada peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MENLHK/SETJEN/Kum.1/6/2017 tentang Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam serta dengan teknis pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : P.6/KSDAE/SET/Kum.1/6/2018 tentang Petunjuk Teknis Kemitraan Konservasi Pada Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

Program ini di buat dengan sasaran penerima program adalah masyarakat Suku Talang Mamak dan Melayu Tua atau secara keseluruhannya adalah masyarakat yang menetap di zona tradisional kawasan TNBT. Adapun bentuk program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan dalam kegiatan mitra konservasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.3 : Program-Program Pemberdayaan Masyarakat Yang Dikelola Oleh TNBT dalam Kegiatan Mitra Konservasi.

NO	DUSUN/DESA	NAMA KTH	KOMODITAS USAHA KELOMPOK
1	Tualang/Siambul	Tualang Sejahtera	Budidaya Rotan Kelukup dan Kelulut
2	Bengayauan/Rantau Langsat	Jelemu Bengayauan	Budidaya Rotan Kelukup dan Madu Kelulut
3	Nunusan/Rantau Langsat	Kasih Alam	Budidaya Rotan Kelukup dan Madu Kelulut
4	Air Bomban/Rantau Langsat	Bomban Berduri	Budidaya Rotan Kelukup dan Madu Kelulut
5	Sadan/Rantau Langsat	Batu Berdiri	Budidaya Pinang dan Madu kelulut
6	Suit/Rantau Langsat	Batu Kucing	Budidaya Madu Kelulut
7	Talang Tanjung/Siambul	Talang Pecinta Alam	Budidaya Madu Kelulut
8	Usul/Batang Gansal	Asuh Bersama	Budidaya Madu Kelulut
9	Datai/Rantau Langsat	Sutan Limbayang	Budidaya Madu Kelulut
10	Rantau Langsat/Batang Gansal	Tunas Harapan	Budidaya Rotan Kelukup dan Madu Kelulut
11	Sungai Akar/Batang Gansal	Pinang Raya	Budidaya Tanaman pinang
12	Talang Lakat/Batang Gansal	Bina Lestari Aren	Pengolahan Produk Nira Aren
8 Dusun/ 5 Desa/ 1 Kecamatan		12 Kelompok	5 Komoditas

Sumber Data : Balai TNBT 2021.

Program yang dikelola TNBT ini telah dilaksanakan dan diupayakan dengan baik dan serius oleh pihaknya agar semuanya bisa optimal dan bermanfaat bagi masyarakat, dari seluruh KTH yang ada di buat dan dibina oleh pihak TNBT ini penghasilan masyarakat diharapkan bisa bertambah tanpa harus masyarakat terfokus dengan satu mata pencaharian saja yang mengharuskan masyarakat mencari pendapatan di dalam hutan saja.

b. Rangkaian Kegiatan Pembinaan Kelompok

Dalam proses pelaksanaan program kemitraan (pemberdayaan Masyarakat), pelaksanaannya memiliki alur kegiatan yang megarahkan seluruh proses pelaksanaan kegiatan tersebut agar bisa mencapai hasil yang di harapkan.

Adapun rangkaian kegiatan pembinaan yang dilakukan pihak Balai TNBT untuk kelompok tani hutan didalam program kemitraan ini dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.4 : Rangkaian Kegiatan Pembinaan Kelompok Tani Hutan dalam Program Kemitraan Konservasi.

NO	KEGIATAN	KETERANGAN
1	Identifikasi Potensi Kemitraan	Menggali potensi HHHBK yang akan dikembangkan dan pemetaan masyarakat
2	Pembentukan Kelompok Tani Hutan (KTH)	Kelompok yang akan menjadi target binaan
3	Penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS)	Penandatanganan PKS antara Balai TNBT dengan KTH di dalam Kawasan sesuai arahan DIRJEN KSDAE
4	Pendatanganan kesepakatan konservasi	Penandatanganan berkas yang berisi kesepakatan konservasi yang ditandatangani kepala desa dan kepala BTNBT
5	Penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Kelompok	Menyusun RKT kelompok satu tahun kedepan
6	Peningkatan Kapasitas SDM kelompok	Berupa pelatihan terkait pengembangan komoditas yang telah ditentukan
7	Pengembangan Usaha ekonomi produktif	Berupa penyerahan bantuan ekonomi
8	Pendampingan Kelompok	Pendampingan kelompok secara berkala
9	Monitoring dan evaluasi progres kemitraan	Berupa pemantauan dan evaluasi secara menyeluruh progres kemitraan konservasi.

Sumber Data : Balai TNBT 2021

Pada Tabel diatas dapat dilihat keseluruhan rangkaian kegiatan kemitraan konservasi dalam alurnya yang mengarahkan seluruh kegiatan pada setiap proses yang ada untuk dijalankan secara terstruktur dan lebih terarah.

D. Struktur Organisasi Di Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

Gambar IV.1 : Struktur Organisasi Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh.



Sumber : Balai TNBT 2021

1. Tugas Pokok dan Fungsi Di Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh

Uraian dari setiap Tugas Pokok dan Fungsi Masing-masing dari setiap perangkat di Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh adalah sebagai berikut :

• **Tupoksi Kepala Balai TNBT**

Kepala Balai mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, koordinasi, bimbingan teknis dan pelayanan teknis, dan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya serta pengelolaan kawasan Taman Nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Balai mempunyai Fungsi :

1. Inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan.
2. Perlindungan dan pengamanan kawasan.
3. Pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati.
4. Pengendalian kebakaran hutan.
5. Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial.
6. Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan.
7. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan.
8. Evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan.
9. Penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.
10. Pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya.
11. Pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya.
12. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.
13. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan.

• **Tupoksi Kepala Sub Bagian Tata Usaha**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagai bagian pengelola dan pembantu di balai mempunyai kedudukan di bawah kepala Balai memiliki tugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan, rencana program dan anggaran.
2. Melaksanakan kerjasama serta kemitraan, urusan administrasi tata persuratan, pelayanan perizinan, pelaksanaan pelayanan promosi dan pemasaran.
3. Mengurus ketatalaksanaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kearsipan dan rumah tangga.
4. Mengurus dan mengelola proses pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, pelaporan serta kehumasan.

- **Tupoksi Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional (SPTN) Wilayah**

Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah merupakan bagian pengelola wilayah di kawasan taman nasional dengan tempat dan lokasi wilayah kerja sesuai bagian yang telah ditetapkan dan dibantu oleh resort-resort yang berada di wilayah kerja tersebut. Adapun tugas Kepala SPTN Wilayah adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kegiatan inventarisasi potensi, penataan kawasan dan rencana pengelolaan kawasan.
2. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan, pengendalian kebakaran hutan.
3. Pelaksanaan evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem, penutupan kawasan.
4. Pelaksanaan pengendalian dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial.
5. Pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan.
6. penyuluhan, bina cinta alam dan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan.

- **Tupoksi Kelompok Pejabat Fungsional**

Kelompok pejabat fungsional pada Balai TNBT terbagi menjadi 3 (Tiga)

kelompok yakni kelompok pejabat Polisi Kehutanan (POLHUT), Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) dan Penyuluh kehutanan.

1. Kelompok Pejabat POLHUT mempunyai tugas pokok menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau, dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan serta pengawasan peredaran hasil hutan.
2. Kelompok Pejabat PEH mempunyai tugas pokok melaksanakan pengendalian ekosistem hutan meliputi : menyiapkan, melaksanakan, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi.

3. Kelompok Pejabat Fungsional Kehutanan mempunyai tugas pokok dan bertanggung jawab serta memiliki wewenang untuk melakukan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Daya Manusia di Balai TNBT

Tabel IV.5 : Jumlah Sumber Daya Manusia Di Balai TNBT Berdasarkan Jabatan.

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Kepala Balai	1
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
3	Kepala SPTN Wilayah 1	1
4	Kepala SPTN Wilayah 2	1
5	Polisi Kehutanan	28
6	Pengendali Ekosistem Hutan	9
7	Penyuluh Kehutanan	3
8	Fungsional Umum	18
9	Tenaga Kontrak	22

Sumber : Balai TNBT 2021

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menyajikan analisis dan pembahasan mengenai hasil-hasil penelitian tentang Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Pulu Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal kabupaten Indragiri Hulu). Analisis ini dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat suku talang mamak yang di buat oleh pihak Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh mengenai bagaimana tingkat keberhasilan program pemberdayaan tersebut dalam meningkatkan pendapatan masyarakat yang ikut dalam program serta untuk menganalisis faktor-faktor penghambat pelaksanaan program guna pencapaian pelaksanaan program yang lebih efektif dan efisien kedepannya.

Data-data yang dianalisis tersebut diperoleh melalui kuisioner yang ditujukan langsung kepada responden yakni Pihak Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok, Kepala Desa Rantau Langsung dan Ketua Kelompok Tani Hutan beserta anggota-anggotanya yang terlibat dan bersangkutan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam budidaya madu kelulut tersebut. Sebelum melakukan analisis terhadap responden yang berkaitan dengan program pemberdayaan tersebut, maka terlebih dahulu akan dianalisis hal-hal yang bersangkutan dengan identitas responden yang

menjadi sampel pada penelitian ini. Sehingga dengan penjabaran identitas dapat mempermudah proses penelitian.

A. Identitas Responden

Sebelum pembahasan mengenai Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu), di dalam penelitian ini yang menjadi sampel atau responden adalah Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok, Kepala Desa, Ketua KTH dan Anggota KTH. Berikut ini uraian tentang identitas responden yang terdiri dari tingkat umur dan tingkat pendidikan.

1. Tingkat Umur

Umur atau Usia adalah salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada seseorang dalam melaksanakan semua tugas dan tanggung jawab yang diberikan, selain itu juga umur atau usia berpengaruh pada produktivitas kerja. Karna semakin lanjut usia seseorang maka akan mempengaruhi tingkat produktivitas kerja, tingkat ketelitian dalam bekerja, konsentrasi dan ketahanan fisik dalam bekerja yang bisa saja dipengaruhi faktor kesehatan, daya tahan tubuh dan hal lainnya. Adapun tingkat umur pelaksana yakni Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa yang menjadi responden dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel V.1 adalah sebagai berikut :

Tabel V.1 : Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Umur Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa

NO	Usia	Jumlah	Presentase
1	18-27	-	-
2	28-37	4	57%
3	38-47	2	29%
4	48-57	1	14%
5	>57	-	-
Jumlah		7	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Berdasarkan Tabel V.1 di atas dapat diketahui bahwa tingkat umur dari jumlah keseluruhan responden yang merupakan Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa yaitu untuk usia 28-37 tahun berjumlah 4 Orang dengan presentase 57%, untuk usia 38-47 tahun berjumlah 2 Orang dengan persentase 29% dan untuk usia 48-57 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 14% persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden yang terbanyak adalah yang berumur 28-37 tahun Karena usia Ini merupakan masa aktif dan produktif dalam menjalankan aktifitas.

Tabel V.2 : Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Umur Ketua KTH dan Anggota KTH

NO	Usia	Jumlah	Presentase
1	18-27	5	21%
2	28-37	7	29%
3	38-47	8	33%
4	48-57	3	13%
5	>57	1	4%
Jumlah		24	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Berdasarkan Tabel V.2 di atas dapat diketahui bahwa untuk identitas responden jika dipandang dari tingkat umur maka menjadi beragam. Untuk usia 18-27 tahun berjumlah 5 orang dengan presentase 21%, untuk usia 28-37 tahun

berjumlah 7 orang dengan persentase 29%, untuk usia 38-47 tahun berjumlah 8 orang dengan persentase 33%, untuk usia 48-57 tahun berjumlah 3 orang dengan persentase 13% dan untuk usia >57 tahun berjumlah 1 orang dengan persentase 4%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden terbanyak adalah yang berumur 38-47 tahun.

2. Tingkat Pendidikan

Selain tingkat umur, tingkat pendidikan juga dapat menjadi pengaruh terhadap responden yang merupakan salah satu kriteria yang akan ditetapkan agar dapat melihat tingkat analisa dan penjelasan informasi dalam kebutuhan penelitian. Sehingga dengan adanya tingkat pendidikan ini akan memberikan gambaran yang jelas terhadap tingkat kebenaran dan akan lebih maksimal. Oleh karena itu dalam penelitian ini identitas responden berdasarkan tingkat pendidikannya harus dipenuhi. Untuk mengetahui identitas setiap responden berdasarkan tingkat pendidikan maka dapat dilihat pada tabel V.3 sebagai berikut.

Tabel V.3 : Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa

NO	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	SD	-	-
2	SLTP	-	-
3	SLTA	-	-
4	Diploma (D3)	1	14%
5	Strata 1 (S1)	4	57%
6	Strata 2 (S2)	2	29%
	Jumlah	7	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Berdasarkan data pada Tabel V.3 di atas dapat diketahui bahwa untuk identitas responden dilihat dari tingkat pendidikan terdiri dari berbagai tingkatan yakni untuk tingkat pendidikan Diploma 3 sebanyak 1 orang dengan presentase 14%, untuk tingkat pendidikan Strata 1 sebanyak 4 orang dengan persentase 57% dan untuk tingkat pendidikan Strata 2 sebanyak 2 orang dengan persentase 29%. Maka dapat diketahui identitas responden yang dilihat dari tingkat pendidikan pada Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa, yang lebih banyak atau dominan yaitu Strata 1.

Tabel V.4 : Distribusi Jumlah Responden Menurut Tingkat Pendidikan Ketua KTH dan Anggota KTH

NO	Pendidikan	Jumlah	Presentase
1	Tidak Sekolah	13	54%
2	SD	9	38%
3	SLTP	1	4%
4	SLTA	1	4%
5	Diploma (D3)	-	-
6	Strata 1 (S1)	-	-
7	Strata 2 (S2)	-	-
Jumlah		24	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Berdasarkan data pada Tabel V.4 diatas dapat diketahui bahwa untuk identitas responden Ketua KTH dan Anggota KTH dilihat dari tingkat pendidikannya terdiri dari berbagai tingkatan, yakni untuk tingkat pendidikan yang Tidak Sekolah sebanyak 13 orang dengan presentase 54%, untuk tingkat pendidikan SD sebanyak 9 orang dengan presentase 38%, untuk tingkat pendidikan SLTP sebanyak 1 orang dengan presentase 4% dan untuk tingkat pendidikan SLTA 1 orang dengan persentase 4% . Maka dapat diketahui untuk identitas reponden pada Ketua KTH dan Anggota KTH terdiri dari berbagai

tingkatan Pendidikan , dengan lebih dominannya atau lebih banyak yaitu Tidak Sekolah faktor pendidikan inilah yang menjadi salah satu alasan bagi masyarakat yang tergabung dalam program pemberdayaan masyarakat ini untuk ikut menjadi anggota agar ada alternatif pencaharian dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya selain bergantung pada hasil hutan lainnya.

3. Jenis Kelamin

Jenis kelamin sangat mempengaruhi sikap dan tingkah laku responden dalam menghadapi suatu pekerjaan, yang mana seorang laki-laki biasanya lebih cepat dan sigap daripada perempuan dalam mengerjakan suatu pekerjaan, begitu juga perempuan yang biasanya lebih rapi dalam mengerjakan suatu pekerjaan dibandingkan laki-laki. Keduanya tentu saja memiliki suatu kelebihan dan kekurangannya masing-masing, oleh karena itu diharapkan keduanya bisa saling mengisi serta melengkapi kekurangan sehingga terbentuklah tim kerja yang baik.

Jenis kelamin juga mempengaruhi dalam hal emosional responden yang bersangkutan, yang mana biasanya laki-laki lebih mudah terpancing emosi daripada perempuan. Perbedaan emosional ini tentu dapat mempengaruhi hasil dari sebuah pekerjaan. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel V.5 berikut.

Tabel V.5 : Distribusi Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	4	57%
2	Perempuan	3	43%
Jumlah		8	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Dari Tabel V.5 di atas dapat diketahui bahwa jumlah Pihak TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa yang dijadikan responden jika dilihat dari jenis kelamin yaitu untuk jenis kelamin Laki-laki sebanyak 4 orang dengan presentase 57% dan untuk jenis kelamin Perempuan sebanyak 3 orang dengan presentase 43%. sehingga dapat diketahui sampel dengan jenis kelamin Laki-laki lebih banyak.

Tabel V.6 : Distribusi Jumlah Responden Menurut Jenis Kelamin Ketua KTH dan Anggota KTH

NO	Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase
1	Laki-laki	22	92%
2	Perempuan	2	8%
Jumlah		24	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Dari Tabel V.6 di atas dapat diketahui bahwa jumlah Ketua KTH dan Anggota KTH yang dijadikan responden jika dilihat dari jenis kelamin yaitu jenis kelamin Laki-laki sebanyak 22 orang dengan presentase 92% dan untuk jenis kelamin Perempuan sebanyak 2 orang dengan presentase 8%. sehingga dapat diketahui jumlah responden dengan jenis kelamin Laki-laki lebih banyak.

B. Tanggapan Responden Penelitian Terhadap Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu)

Untuk melihat Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu) yang dijadikan indikator adalah standar dan sasaran, kinerja

kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik pelaksana, lingkungan sosial ekonomi dan sikap pelaksana. Dengan hasil sebagai berikut.

1. Standar dan Sasaran

Dalam tulisan ini yang dimaksudkan dengan standar dan sasaran adalah hal-hal yang perlu diketahui untuk tentang apa yang hendak dicapai oleh suatu program atau kebijakan. Baik yang berwujud maupun tidak dengan ketentuan masa waktu dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Maksudnya disini adalah untuk mengetahui tujuan dibuatnya suatu program pemberdayaan masyarakat dari segi penyusunan rencana hingga dengan penentuan hasil yang hendak dicapai nantinya. Untuk melihat hasil tanggapan responden yani Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli dan Kepala Desa mengenai indikator standar dan sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.7 : Tanggapan Responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa Dilihat Dari Indikator Standar dan Sasaran

NO	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Penentuan kriteria penerima program	7 (100%)	-	-	7
2	Penerapan target hasil produksi madu yang hendak dicapai	2 (29%)	5 (71%)	-	7
3	SOP (standart Operational Procedure)	4 (57%)	3 (43%)	-	7
Jumlah		13	8	-	21
Rata-Rata		4	3	-	7
Presentase		62%	38%	-	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Dari Tabel V.7 dapat dilihat bahwa tanggapan responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa terhadap indikator standar dan sasaran dengan item penilaian pada pertanyaan Penentuan kriteria penerima program yang menjawab Terlaksana sebanyak 7 orang dengan presentase 100% , Cukup Terlaksana tidak ada yang menjawab dan Tidak Terlaksana juga tidak ada yang menjawab. jadi untuk item pertanyaan Penentuan kriteria penerima program mengatakan “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan dalam penentuan kriteria penerima program memang sudah di buat terlebih dahulu sebelum program dilaksanakan.

Untuk item penilaian kedua dengan pertanyaan Penetapan target hasil produksi madu yang hendak dicapai melalui program. Yang menjawab Terlaksana sebanyak 2 orang dengan presentase 29%, yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 4 orang dengan presentase 57%, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk item pertanyaan mengenai penetapan target hasil produksi madu yang hendak dicapai melalui program mengatakan “Cukup Terlaksana” hal ini dikarenakan penetapan target hasil produksi madu yang hendak dicapai melalui program memang belum ada ditetapkan harus berapa banyaknya walaupun yang seharusnya itu setiap bulan madu harus di panen.

Dan untuk item penilaian ketiga dengan pertanyaan SOP (Standart Operational Procedure). Yang menjawab Terlaksana sebanyak 4 orang dengan presentase 57%, yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 3 orang dengan presentase 43%, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk pertanyaan SOP (Standart Operational Procedure) mengatakan

“Terlaksana”. Hal ini karena SOP dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat sudah dibuat.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa terhadap indikator Standar dan Sasaran berada pada kategori **“Terlaksana”** yakni dengan rata-rata 4 orang dengan presentase 62% dari keseluruhan responden yang berjumlah 7 orang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Fonda selaku pendamping kelompok tani hutan di zona tradisional, Hari Jum'at Tanggal 3 September Tahun 2021 beliau mengatakan :

“Dalam upaya TNBT untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal yang hidup di kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh terkhususnya masyarakat yang berada di zona tradisional kami sudah membuat kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui banyak program budidaya seperti budidaya rotan kelukup, jernang dan juga budidaya madu kelulut ini dengan target atau sasaran penerima programnya adalah masyarakat lokal seperti suku Talang Mamak dan Melayu Tua”

Berdasarkan hasil observasi penulis melihat dan mengetahui bahwa penentuan standar dan sasaran memang sudah ada dibuat serta ditetapkan oleh pihak Balai TNBT baik untuk sasaran penerima program dan SOP untuk pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini walaupun demikian ternyata untuk target pencapaian hasil produksi madu masih belum ada ketetapan yang di tekankan harus berapa banyak dalam setiap bulannya.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan responden Ketua KTH dan Anggota KTH yang berjumlah 24 orang responden terhadap indikator Standar dan Sasaran dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.8 : Tanggapan Responden Ketua KTH dan Anggota KTH Dilihat Dari Indikator Standar dan Sasaran

NO	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Penentuan kriteria penerima program	24 (100%)	-	-	24
2	Penetapan target hasil produksi madu yang hendak dicapai	12 (50%)	12 (50%)	-	24
3	SOP (standart Operational Procedure)	24 (100%)	-	-	24
Jumlah		60	12	-	72
Rata-Rata		20	4	-	24
Presentase		83%	17%		100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Dari Tabel V.8 dapat dilihat bahwa tanggapan responden Ketua KTH dan Anggota KTH terhadap indikator standar dan sasaran dengan item penilaian pada pertanyaan Penentuan kriteria penerima program yang menjawab Terlaksana sebanyak 24 orang dengan presentase 100% , yang menjawab Cukup Terlaksana tidak ada yang menjawab, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk item pertanyaan Penentuan kriteria penerima program mengatakan “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan dalam penentuan kriteria penerima program bagi masyarakat mereka sudah mengetahui itu ditujukan untuk masyarakat di kawasan TNBT.

Untuk item penilaian kedua dengan pertanyaan Penetapan target hasil produksi madu yang hendak dicapai melalui program. Yang menjawab Terlaksana

sebanyak 12 orang dengan presentase 50%, yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 12 orang dengan presentase 50%, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk item pertanyaan mengenai penetapan target hasil produksi madu yang hendak dicapai melalui program mengatakan “Cukup Terlaksana” hal ini dikarenakan penetapan target hasil produksi madu yang hendak dicapai belum diberitahukan dan ditetapkan kepada masyarakat seharusnya berapa banyak ditiap bulannya.

Dan untuk item penilaian ketiga dengan pertanyaan SOP (Standart Operational Procedure). Yang menjawab Terlaksana sebanyak 24 orang dengan presentase 100%, yang menjawab Cukup Terlaksana tidak ada yang menjawab, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk pertanyaan SOP (Standart Operational Procedure) mengatakan “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan dalam pembuatan SOP sudah diketahui bagi sebagian masyarakat penerima program.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh Ketua KTH dan Anggota KTH terhadap indikator Standar dan Sasaran berada pada kategori “**Terlaksana**” yakni dengan rata-rata 20 orang dengan presentase 83% dari keseluruhan responden yang berjumlah 24 orang.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan masyarakat penerima program memang rata-rata masih belum mengetahui tentang bagaimana proses penentuan penetapan standar dan sararan yang dibuat dalam program pemberdayaan masyarakat ini terkhusus tentang penetapan target hasil produksi.

2. Sumber Daya

Sumber Daya merupakan suatu komponen penting yang sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan sebuah program maupun kebijakan yang terdiri dari unsur-unsur Sumber Daya Organisasi. Maksudnya disini adalah keberhasilan suatu program ataupun sebuah kebijakan bergantung pada sumber daya manusia yang dimiliki oleh organisasi maupun ketersediaan dana yang ada agar setiap proses pelaksanaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Untuk melihat hasil tanggapan responden yani Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli dan Kepala Desa mengenai indikator Sumber daya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.9 : Tanggapan Responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa Dilihat Dari Indikator Sumber Daya

NO	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Sumber Daya Manusia	-	7 (100%)	-	7
2	Sarana dan prasarana	2 (29%)	5 (71%)	-	7
3	Ketersediaan dana	3 (43%)	4 (57%)	-	7
Jumlah		5	16	-	21
Rata-Rata		2	5	-	7
Presentase		24%	76%	-	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Dari Tabel V.9 dapat dilihat bahwa tanggapan responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa terhadap indikator Sumber Daya dengan item penilaian pada pertanyaan Sumberdaya Manusia yang menjawab Terlaksana tidak ada yang menjawab, yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 7 orang dengan presentase 100%, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk item pertanyaan Sumber Daya

manusia mengatakan “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan Sumber daya manusia yang ada dalam pelaksanaan program pemberdayaan terkhusus untuk pendampingan dan pengawasan terhadap program masih terbatas jumlahnya.

Untuk item penilaian kedua dengan pertanyaan Sarana dan Prasarana. Yang menjawab Terlaksana sebanyak 2 orang dengan presentase 29%, yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 5 orang dengan presentase 71%, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk item pertanyaan mengenai Sarana dan Prasarana mengatakan “Cukup Terlaksana” hal ini dikarenakan Sarana dan Prasarana untuk pelaksanaan program pemberdayaan memang sudah di usahakan memadai, akan tetapi dengan jumlah yang sekarang masih dapat dikatakan masih kurang memadai untuk keseluruhan pelaksanaan program.

Dan untuk item penilaian ketiga dengan pertanyaan mengenai Ketersediaan dana. Yang menjawab Terlaksana sebanyak 3 orang dengan presentase 43%, yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 4 orang dengan presentase 57%%, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk pertanyaan tentang Ketersediaan Dana mengatakan “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan ketersediaan dana yang ada dalam program pemberdayaan masyarakat ini jika dilihat dari data yang diperlihatkan pihak Balai TNBT memperlihatkan jumlahnya kurang cukup untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan ini.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa terhadap indikator Sumber Daya berada pada kategori **“Cukup Terlaksana”** yakni dengan rata-rata 5 orang dengan presentase 76% dari keseluruhan responden yang berjumlah 7 orang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Fonda, Hari Jum'at Tanggal 3 September Tahun 2021 beliau mengatakan :

“Dalam pelaksanaan program ini kami selaku pendamping KTH sebenarnya hanya berjumlah 2 orang yakni saya sendiri bersama Ibuk Nur Hajjah dengan pembagian wilayah kerjanya masing-masing, walaupun begitu dengan jumlah yakni hanya kami berdua orang yang harus melakukan kegiatan pendampingan dan memonitoring langsung kepada KTH bisa dikatakan kurang maksimal dalam segi pendampingannya sehingga kadang kami juga meminta dan mendapat bantuan dari rekan kami yang lain untuk membantu kami walaupun bukan menjadi bidang atau bagian mereka untuk program pemberdayaan masyarakat ini belum lagi akses jalan menuju lokasi yang jauh dan hanya bisa dilalui via jalur air dan juga sulit untuk mendapatkan jaringan komunikasi kadang menjadi bagian tersulit juga bagi kami dalam melaksanakan program ini..”

Berdasarkan hasil observasi penulis melihat dan mengetahui bahwa Sumber Daya Manusia yang dimiliki memang masih kekurangan terkhusus untuk pendamping yang jumlahnya lebih sedikit dibanding Kelompok Tani Hutan yang ada sehingga kurang maksimalnya pendampingan untuk penerima program pemberdayaan ini karna keterbatasan sumber daya manusia yang ada belum lagi kekurangan fasilitas pendukung seperti sampan bermesin yang seharusnya dimiliki pihak Balai TNBT agar memudahkan pendamping menuju lokasi pemberdayaan ini.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan responden Ketua KTH dan Anggota KTH yang berjumlah 24 orang responden terhadap indikator Sumber Daya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.10 : Tanggapan Responden Ketua KTH dan Anggota KTH Dilihat Dari Indikator Sumber Daya

NO	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Sumber Daya Manusia	-	24 (100%)	-	24 (100%)
2	Sarana dan Prasarana	24 (100%)	-	-	24 (100%)
3	Ketersediaan dana	10 (42%)	14 (58%)	-	24 (100%)
Jumlah		34	38	-	72
Rata-Rata		11	13	-	24
Presentase		47%	53%	-	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Dari Tabel V.10 dapat dilihat bahwa tanggapan responden Ketua KTH dan Anggota KTH terhadap indikator Sumber Daya dengan item penilaian pada pertanyaan Sumber Daya Manusia yang menjawab Terlaksana tidak ada yang menjawab, yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 24 orang dengan presentase 100%, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk item pertanyaan Sumber Daya Manusia mengatakan “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan dalam hal jumlah Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan program baik itu untuk pendampingan dan pengawasan dirasa bagi masyarakat masih kurang jumlahnya.

Untuk item penilaian kedua dengan pertanyaan Sarana dan Prasarana. Yang menjawab Terlaksana sebanyak 24 orang dengan presentase 100%, yang

menjawab Cukup Terlaksana tidak ada yang menjawab, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk item pertanyaan mengenai Sarana dan prasarana mengatakan “Terlaksana” hal ini dikarenakan Sarana dan Prasana yang ada dirasa masyarakat sudah memadai guna memenuhi kebutuhan produksi madu kelulut.

Dan untuk item penilaian ketiga dengan pertanyaan Ketersediaan Dana. Yang menjawab Terlaksana sebanyak 10 orang dengan presentase 42%, yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 14 orang dengan presentase 58%, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk pertanyaan terkait Ketersediaan dana mengatakan “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan Ketersediaan dana yang ada masih terlihat dan dirasa kurang oleh massyarakat untuk mendukung kegiatan program untuk berjalan dengan baik.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh Ketua KTH dan Anggota KTH terhadap indikator Sumberdaya berada pada kategori “**Cukup Terlaksana**” yakni dengan rata-rata 13 orang dengan presentase 53% dari keseluruhan responden yang berjumlah 24 orang.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan masyarakat penerima program memang rata-rata marasa jumlah Sumberdaya yang ada dalam program pemberdayaan ini masih banyak kekurangan baik itu sumber daya manusia dalam melakukan pengawsan dan pendampingan (Pihak Balai TNBT), ketersediaan sarana dan prasarana pendukung hingga ketersediaan dana dalam pelaksanaan program yang juga dirasa kurang mencukupi untuk keperluan dan kebutuhan

pelaksanaan program sehingga masyarakat merasa dalam hal sumberdaya ini masih belum optimal untuk pelaksanaan program.

3. Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi yang dimaksud yakni merupakan koordinasi dalam pelaksanaan program maupun kebijakan. Semakin baik koordinasi yang dilakukan dalam komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses pelaksanaan program maka yang terjadi adalah semakin terminimalisirnya kesalahan-kesalahan yang akan terjadi dan begitu pula sebaliknya. Untuk melihat hasil tanggapan responden yani Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli dan Kepala Desa mengenai indikator Komunikasi antar organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.11 : Tanggapan Responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa Dilihat Dari Indikator Komunikasi Antar Organisasi

NO	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Sosialisasi tentang program	7 (100%)	-	-	7
2	Keterkaitan dengan pemerintah desa dan instansi lainnya	7 (100%)	-	-	7
Jumlah		14	-	-	14
Rata-Rata		7	-	-	7
Presentase		100%	-	-	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Dari Tabel V.11 dapat dilihat bahwa tanggapan responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa terhadap indikator komunikasi antar organisasi dengan item penilaian pada pertanyaan sosialisasi

tentang program yang menjawab Terlaksana sebanyak 7 orang dengan presentase 100% , yang menjawab Cukup Terlaksana tidak ada yang menjawab, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk item pertanyaan mengenai sosialisasi tentang program mengatakan “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan dalam sosialisasi mengenai program memang sudah dilaksanakan oleh pihak pelaksana.

Untuk item penilaian kedua dengan pertanyaan mengenai keterkaitan dengan pemerintah desa dan instansi lainnya. Yang menjawab Terlaksana sebanyak 7 orang dengan presentase 100%, yang menjawab Cukup Terlaksana tidak ada yang menjawab, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada menjawab. jadi untuk item pertanyaan mengenai Keterkaitan dengan pemerintah desa dan instansi lainnya mengatakan “Terlaksana” hal ini dikarenakan pihak Balai TNBT memang melaksanakan Koordinasi dan menjalin kerjasama dengan instansi lainnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa terhadap indikator Komunikasi antar organisasi berada pada kategori “**Terlaksana**” yakni dengan rata-rata 7 orang dengan presentase 100% dari keseluruhan responden yang berjumlah 7 orang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Fonda selaku pendamping dan penyuluh KTH, Hari Jum,at Tanggal 3 September Tahun 2021 beliau mengatakan :

“Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang kami laksanakan tidak hanya menjadikan kami (Pihak Balai TNBT) sebagai pelaksananya sendiri, kami juga mengajak pihak lainnya seperti pihak Balai Litbang Teknologi Serat Tanaman Hutan Kuok untuk membantu pelaksanaan program ini dengan keikutsertaan mereka sebagai narasumber dalam pelaksanaan sosialisasi dan membantu mengajari masyarakat mengenai teknis budidaya madu kelulut. Sementara untuk koordinasi dengan pihak desa selalu kami lakukan karna pada dasarnya pun wilayah kerja kami berada di wilayah administrasi pemerintahan desa jadi tentu alur koordinasi dan komunikasi yang benar harus dilakukan”.

Berdasarkan hasil observasi penulis melihat dan mengetahui bahwa Komunikasi antar organisasi yang dilakukan memang sudah berjalan dengan baik, hal ini sesuai juga seperti jawaban dari pihak lain selaku instansi terkait seperti tenaga ahli BP2TSTH kuok dan kepala desa memang sudah mendapati pelaksanaan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait sudah dilakukan dengan baik.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan responden Ketua KTH dan Anggota KTH yang berjumlah 24 orang responden terhadap indikator Komunikasi antar organisasi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.12 : Tanggapan Responden Ketua KTH dan Anggota KTH Dilihat Dari Indikator Komunikasi Antar Organisasi

NO	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Sosialisasi tentang program	24 (100%)	-	-	24
2	Keterkaitan dengan pemerintah desa dan instansi lainnya	24 (100%)	-	-	24
	Jumlah	48	-	-	48
	Rata-Rata	24	-	-	24
	Presentase	100%	-	-	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Dari Tabel V.12 dapat dilihat bahwa tanggapan responden Ketua KTH dan Anggota KTH terhadap indikator komunikasi antar organisasi dengan item penilaian pada pertanyaan Sosialisasi tentang program, yang menjawab Terlaksana sebanyak 24 orang dengan presentase 100% , yang menjawab Cukup Terlaksana tidak ada yang menjawab, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk item pertanyaan mengenai sosialisasi tentang program mengatakan “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan sosialisasi tentang program di masyarakat sudah dilaksanakan dan di ikuti langsung juga oleh sebagian masyarakat penerima program.

Untuk item penilaian kedua dengan pertanyaan Keterkaitan dengan pemerintah desa dan instansi lainnya. Yang menjawab Terlaksana sebanyak 24 orang dengan presentase 100%, yang menjawab Cukup Terlaksana tidak ada yang menjawab, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk item pertanyaan keterkaitan dengan pemerintah desa dan instansi lainnya

mengatakan “Terlaksana” hal ini dikarenakan keterkaitan dengan pemerintah desa dan instansi lainnya dilihat pernah oleh masyarakat.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh Ketua KTH dan Anggota KTH terhadap indikator Komunikasi antar organisasi berada pada kategori “**Terlaksana**” yakni dengan rata-rata 24 orang dengan presentase 100% dari keseluruhan responden yang berjumlah 24 orang.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan melihat bahwa komunikasi yang terbangun sudah baik dalam pelaksanaan program karna proses mengenai sosialisasi tentang program dilaksanakan dengan baik serta untuk koordinasi dengan instansi lainnya juga dilaksanakan.

4. Karakteristik Pelaksana

Karakteristik pelaksana merupakan suatu hal yang mencakup pada struktur birokrasi, norma-norma dan pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi. Yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program. Maksudnya disini ialah seperti misalnya implementasi program yang berusaha untuk merubah keadaan tertentu dilingkungan masyarakat maka agen pelaksana harus berkarakteristik yang memiliki inovasi untuk mengembangkan suatu program agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari program tersebut dengan baik. Untuk melihat hasil tanggapan responden yani Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli dan Kepala Desa mengenai indikator karakteristik pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.13 : Tanggapan Responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa Dilihat Dari Indikator Karakteristik Pelaksana

NO	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Jelasnya fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana	6 (86%)	1 (14%)	-	7
2	Tingkat komitmen dan kejujuran pelaksana	7 (100%)	-	-	7
3	Fasilitator penyelesaian masalah	5 (71%)	2 (29%)	-	7
Jumlah		18	3	-	21
Rata-Rata		6	1	-	7
Presentase		86%	14%	-	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Dari Tabel V.13 dapat dilihat bahwa tanggapan responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa terhadap indikator karakteristik pelaksana dengan item penilaian pada pertanyaan jelasnya fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana yang menjawab Terlaksana sebanyak 6 orang dengan presentase 86% , yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 1 orang dengan presentase 14%, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk item pertanyaan jelasnya fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana mengatakan “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan jelasnya fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana dalam program sudah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing selaku pelaksana.

Untuk item penilaian kedua dengan pertanyaan tingkat komitmen dan kejujuran pelaksana. Yang menjawab Terlaksana sebanyak 7 orang dengan presentase 100%, yang menjawab Cukup Terlaksana tidak ada yang menjawab, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk item

pertanyaan mengenai tingkat komitmen dan kejujuran pelaksana mengatakan “Terlaksana” hal ini dikarenakan komitmen yang pelaksana tanamkan dalam program benar-benar sudah ditujukan untuk mendukung dan mensukseskan pelaksanaan program dan kejujuran pelaksanapun sudah terlihat dengan bagaimana keterbukaan mereka dengan masyarakat penerima program mengenai seluruh informasi dalam program.

Dan untuk item penilaian ketiga dengan pertanyaan mengenai fasilitator penyelesaian masalah. Yang menjawab Terlaksana sebanyak 5 orang dengan presentase 71%, yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 2 orang dengan presentase 29%, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk pertanyaan fasilitator penyelesaian masalah mengatakan “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan rata-rata responden yang terkait dalam pelaksanaan program ini memiliki kemampuan untuk membantu KTH-KTH binaan dalam penyelesaian masalah yang ada saat kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam budidaya madu kelulut ini.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa terhadap indikator Karakteristik pelaksana berada pada kategori “**Terlaksana**” yakni dengan rata-rata 6 orang dengan presentase 86% dari keseluruhan responden yang berjumlah 7 orang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Fonda selaku pendamping dan penyuluh, Hari jum'at Tanggal 3 september Tahun 2021 beliau mengatakan :

“Dalam pelaksanaan program pemberdayaan ini kami selaku pelaksana memang diharuskan menjalankan fungsi dan tugas kami sesuai dengan tanggung jawab masing-masing sesuai ketentuan yang ada dan kami juga diminta dalam pelaksanaan program ini harus melaksankannya dengan komitmen kami untuk membantu dan mensukseskan program ini agar berdampak baik bagi masyarakat nantinya. Selain itu dalam hal penyelesaian masalah yang ditemui dalam pelaksanaan pembinaan atau pendampingan kelompok tani kami selalu mengupayakan bisa menjadi orang yang paling pertama untuk bisa menyelesaikan masalah tersebut.”

Berdasarkan hasil observasi penulis melihat dan mengetahui bahwa karakteristik pelaksana rata-rata memang bertanggung jawab dengan baik dan mengetahui juga fungsi mereka dengan baik dalam pelaksanaan program yang dijalankan ini.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan responden Ketua KTH dan Anggota KTH yang berjumlah 24 orang responden terhadap indikator Karakteristik pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.14 : Tanggapan Responden Ketua KTH dan Anggota KTH Dilihat Dari Indikator Karakteristik Pelaksana

NO	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Jelasnya fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana	24 (100%)	-	-	24
2	Tingkat komitmen dan kejujuran pelaksana	13 (54%)	11 (46%)	-	24
3	Fasilitator penyelesaian masalah	10 (42%)	14 (58%)	-	24
Jumlah		47	25	-	72
Rata-Rata		16	8	-	24
Presentase		65%	35%	-	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Dari Tabel V.14 dapat dilihat bahwa tanggapan responden Ketua KTH dan Anggota KTH terhadap Karakteristik pelaksana dengan item penilaian pada pertanyaan jelasnya fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana yang menjawab Terlaksana sebanyak 24 orang dengan presentase 100% , yang menjawab Cukup Terlaksana tidak ada yang menjawab, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk item pertanyaan jelasnya fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana mengatakan “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan dalam jelasnya fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana dinilai oleh masyarakat mungkin sudah sesuai dengan bagian mereka masing-masing.

Untuk item penilaian kedua dengan pertanyaan tingkat komitmen dan kejujuran pelaksana. Yang menjawab Terlaksana sebanyak 13 orang dengan presentase 54%, yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 11 orang dengan presentase 46%, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang

menjawab. jadi untuk item pertanyaan mengenai tingkat komitmen dan kejujuran pelaksana mengatakan “Terlaksana” hal ini dikarenakan tingkat komitmen dan kejujuran pelaksana benar dirasakan baik oleh sebagian masyarakat selaku penerima program.

Dan untuk item penilaian ketiga dengan pertanyaan fasilitator penyelesaian masalah. Yang menjawab Terlaksana sebanyak 10 orang dengan presentase 42%, yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 14 orang dengan presentase 58%, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk pertanyaan fasilitator penyelesaian masalah mengatakan “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan pihak pelaksana dirasa sebagian masyarakat bisa menyelesaikan masalah yang ada ditemui masyarakat dalam proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan ini.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh Ketua KTH dan Anggota KTH terhadap indikator Karakteristik pelaksana berada pada kategori “**Terlaksana**” yakni dengan rata-rata 16 orang dengan presentase 65% dari keseluruhan responden yang berjumlah 24 orang.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terlihat bahwa karakteristik yang dimiliki masing-masing pelaksana dijalankan dengan baik dilingkungan masyarakat penerima program dan sesuai dengan norma-norma dan ketentuan yang ada dalam proses pelaksanaannya.

5. Lingkungan Sosial dan Ekonomi

Lingkungan Sosial dan Ekonomi merupakan tolak ukur sejauh mana lingkungan eksternal mampu mendorong keberhasilan implementasi program ataupun kebijakan yang telah ditetapkan. Maksudnya disini seperti keikutsertaan masyarakat dalam berpartisipasi dalam program dalam mencapai keberhasilan atau tujuan dari program tersebut. Untuk melihat hasil tanggapan responden yani Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli dan Kepala Desa mengenai indikator Lingkungan Sosial dan Ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.15 : Tanggapan Responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa Dilihat Dari Indikator Lingkungan Sosial dan Ekonomi

NO	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Adanya hubungan baik dengan masyarakat	7 (100%)	-	-	7
2	Adanya tanggapan positif masyarakat terhadap program	7 (100%)	-	-	7
3	Pengaruh program terhadap masyarakat	7 (100%)	-	-	7
Jumlah		21	-	-	21
Rata-Rata		7	-	-	7
Presentase		100%	-	-	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Dari Tabel V.15 dapat dilihat bahwa tanggapan responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa terhadap indikator Lingkungan Sosial dan Ekonomi dengan item penilaian pada pertanyaan adanya hubungan dengan masyarakat yang menjawab Terlaksana sebanyak 7 orang dengan presentase 100% , yang menjawab Cukup Terlaksana tidak ada yang menjawab, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk item pertanyaan adanya hubungan baik dengan masyarakat mengatakan “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan dalam upaya menciptakan hubungan baik

dengan masyarakat dalam program pemberdayaan pelaksana sudah melakukan komunikasi dan pendekatan yang baik kepada masyarakat.

Untuk item penilaian kedua dengan pertanyaan adanya tanggapan positif masyarakat terhadap program. Yang menjawab Terlaksana sebanyak 7 orang dengan presentase 100%, yang menjawab Cukup Terlaksana tidak ada yang menjawab, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk item pertanyaan mengenai Adanya tanggapan positif masyarakat terhadap program mengatakan “Terlaksana” hal ini dikarenakan upaya menghadirkan tanggapan positif kepada masyarakat yang terlibat dalam program sudah sangat baik karna dapat dilihat masyarakat menganggap bahwa program yang dibuat ini akan memberikan hal positif juga kepada mereka.

Dan untuk item penilaian ketiga dengan pertanyaan mengenai pengaruh program terhadap masyarakat. Yang menjawab Terlaksana sebanyak 7 orang dengan presentase 100%, yang menjawab Cukup Terlaksana tidak ada yang menjawab, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk pertanyaan pengaruh program terhadap masyarakat mengatakan “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan pengaruh program terhadap masyarakat dinilai oleh pihak pelaksana akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat tanpa harus fokus pada mata pencaharian yang mengharuskan masyarakat terus bergantung pada hasil alam yang ada didalam hutan saja.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa

terhadap indikator Lingkungan sosial dan ekonomi berada pada kategori “**Terlaksana**” yakni dengan rata-rata 7 orang dengan presentase 100% dari keseluruhan responden yang berjumlah 7 orang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Fonda selaku pendamping dan penyuluh, Hari jum’at Tanggal 3 september Tahun 2021 beliau mengatakan :

“lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat yang menjadi sasaran program pemberdayaan ini memang rata-rata masyarakatnya fokus mencari penghasilan melalui hasil alam yang ada dikawasan TNBT tanpa pernah mencoba berpikir untuk menghadirkan alternatif pendapatan melalui budidaya madu kelulut. Jadi saat kami menghadirkan program ini kemasyarakat di kawasan TNBT mereka langsung menyambutnya dengan baik dan positif karna juga pastinya mereka juga meyakini program yang kami buat akan mampu membuat pendapatan ekonominya meningkat.”

Berdasarkan hasil observasi penulis melihat dan mengetahui bahwa keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakat yang berada dikawasan TNBT saat program ini mulai dilaksanakan mereka benar-benar menyambut hal tersebut dengan baik dan benar-benar yakin usaha yang akan mereka lakukan dari budidaya madu kelulut ini akan menghasilkan dan meningkatkan ekonomi mereka.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan responden Ketua KTH dan Anggota KTH yang berjumlah 24 orang responden terhadap indikator Lingkungan Sosial dan Ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.16 : Tanggapan Responden Ketua KTH dan Anggota KTH Dilihat Dari Indikator Lingkungan Sosial dan Ekonomi

NO	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Adanya hubungan baik dengan masyarakat	24 (100%)	-	-	24
2	Adanya tanggapan positif masyarakat terhadap program	24 (100%)	-	-	24
3	Pengaruh program terhadap masyarakat	12 (50%)	12 (50%)	-	24
Jumlah		60	12	-	72
Rata-Rata		20	4	-	24
Presentase		83%	17%	-	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Dari Tabel V.16 dapat dilihat bahwa tanggapan responden Ketua KTH dan Anggota KTH terhadap Lingkungan Sosial dan Ekonomi dengan item penilaian pada pertanyaan adanya hubungan baik dengan masyarakat yang menjawab Terlaksana sebanyak 24 orang dengan presentase 100% , yang menjawab Cukup Terlaksana tidak ada yang menjawab, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk item pertanyaan adanya hubungan baik dengan masyarakat mengatakan “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan dalam menciptakan hubungan baik bagi masyarakat pihak pelaksana sudah melakukannya dengan baik.

Untuk item penilaian kedua dengan pertanyaan mengenai adanya tanggapan positif masyarakat terhadap program. Yang menjawab Terlaksana sebanyak 24 orang dengan presentase 100%, yang menjawab Cukup Terlaksana tidak ada yang menjawab, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk item pertanyaan mengenai adanya tanggapan positif

masyarakat terhadap program mengatakan “Terlaksana” hal ini dikarenakan masyarakat penerima program benar menanggapi positif program yang telah dibuat ini dan mengharapkan hasil yang positif juga kedepannya.

Dan untuk item penilaian ketiga dengan pertanyaan pengaruh program terhadap masyarakat. Yang menjawab Terlaksana sebanyak 12 orang dengan presentase 50%, yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 12 orang dengan presentase 50%, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab jadi untuk pertanyaan pengaruh program terhadap masyarakat mengatakan “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan dalam pengaruh program terhadap pendapatan masyarakat masih dirasa kurang berpengaruh dirasa oleh masyarakat karna juga sebagian masyarakat mengaku belum sama sekali mendapat bagian hasil dari program tersebut.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh Ketua KTH dan Anggota KTH terhadap indikator Lingkungan Sosial dan Ekonomi berada pada kategori “**Terlaksana**” yakni dengan rata-rata 20 orang dengan presentase 83% dari keseluruhan responden yang berjumlah 24 orang.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terlihat bahwa pengaruh lingkungan sosial yang ada di beberapa dusun tempat pelaksanaan program memang masyarakat menyabut baik dan mendapat tanggapan positif walaupun dalam segi lingkungan ekonominya masyarakat masih belum merasakan dampak yang begitu signifikan dari hasil yang didapat melalui program pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan tersebut.

6. Sikap Pelaksana

Sikap pelaksana merupakan bagaimana gambaran mengenai penerimaan atau penolakan dari para pelaksana akan banyak mempengaruhi berhasil atau tidaknya kinerja implementasi program maupun kebijakan publik. Hal seperti ini sangat mungkin bisa terjadi jika formulasi dari suatu kebijakan atau program yang dibuat untuk masyarakat dirasa tidak dibutuhkan entah itu karna faktor masyarakat merasa tidak mampu menerima program atau kebijakan yang dibuat atau faktor lainnya yang lebih diketahui berkenaan lingkungan yang ada dimasyarakat. Maksudnya disini adalah sikap para pelaksana harus bisa menyesuaikan apa rencana program atau kebijakan yang dibuat dengan apa yang dibutuhkan dan diharapkan oleh masyarakat sekitarnya. Untuk melihat hasil tanggapan responden yani Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli dan Kepala Desa mengenai indikator Sikap Pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.17 : Tanggapan Responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa Dilihat Dari Indikator Sikap Pelaksana

NO	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Pemahaman dan pendalaman program	5 (71%)	2 (29%)	-	7
2	Masyarakat ikut berpartisipasi dalam program	4 (57%)	3 (43%)	-	7
3	Kemampuan melakukan pengembangan program	5 (71%)	2 (29%)	-	7
Jumlah		14	7	-	21
Rata-Rata		5	2	-	7
Presentase		67%	33%	-	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Dari Tabel V.17 dapat dilihat bahwa tanggapan responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa terhadap indikator Sikap

Pelaksana dengan item penilaian pada pertanyaan pemahaman dan pendalaman terhadap program yang menjawab Terlaksana sebanyak 5 orang dengan presentase 71% , yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 2 orang dengan presentase 29%, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk item pertanyaan pemahaman dan pendalaman terhadap program mengatakan “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan dalam hal pemahaman dan pendalaman terhadap program pelaksana sudah melakukannya agar bisa menjalankan tugasnya secara optimal.

Untuk item penilaian kedua dengan pertanyaan mengenai masyarakat ikut berpartisipasi dalam program. Yang menjawab Terlaksana sebanyak 4 orang dengan presentase 57%, yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 3 orang dengan presentase 43%, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk item pertanyaan mengenai masyarakat ikut berpartisipasi dalam program mengatakan “Terlaksana” hal ini dikarenakan pihak pelaksana sudah menganggap masyarakat yang mengikuti program sudah berpartisipasi.

Dan untuk item penilaian ketiga dengan pertanyaan kemampuan melakukan pengembangan program. Yang menjawab Terlaksana sebanyak 5 orang dengan presentase 71%, yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 2 orang dengan presentase 29%, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk pertanyaan kemampuan melakukan pengembangan program mengatakan “Terlaksana”. Hal ini dikarenakan kemampuan melakukan pengembangan program oleh pihak pelaksana sudah dilakukan dan dapat dibuktikan bahwa ada upaya pihak pelaksana melakukan pengembangan hasil

produksi tidak hanya berfokus pada madu melainkan menghasilkan hasil lainnya yang bisa dikembangkan seperti membuat sabun dan lainnya.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa terhadap indikator Sikap pelaksana berada pada kategori “**Terlaksana**” yakni dengan rata-rata 5 orang dengan presentase 67% dari keseluruhan responden yang berjumlah 7 orang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Ibu Fonda selaku pendampin dan penyuluh, Hari jum’at Tanggal 3 september Tahun 2021 beliau mengatakan :

“pelaksana dalam program pemberdayaan ini rata-rata sudah memiliki keahlian yang baik dalam kegiatan budidaya madu kelulut karna memang sudah memahami bagaimana teknis budidaya yang baik dan juga kami mampu membuat produksi hasil lainnya selain madu melalui kegiatan budidaya ini walaupun faktor terpenting berada di masyarakat juga untuk ikut berpartisipasi secara lebih agar program bisa dilaksanakan dengan baik masih terdapat beberapa masyarakat yang kurang partisipasinya dalam program ini.”

Berdasarkan hasil observasi penulis melihat dan mengetahui bahwa dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dibuat untuk masyarakat lokal ini sikap para pelaksana dilingkungan Balai TNBT mulai dari penyuluh serta tenaga ahli dari instansi lain (BP2TSTH) sudah mengupayakan setiap proses pelaksanaan program ini dapat berjalan sesuai keinginan masyarakat agar tumbuhnya partisipasi masyarakat yang tinggi untuk pencapaian tujuan program.

Selanjutnya untuk mengetahui jawaban atau tanggapan responden Ketua KTH dan Anggota KTH yang berjumlah 24 orang responden terhadap indikator Sikap Pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel V.18 : Tanggapan Responden Ketua KTH dan Anggota KTH Dilihat Dari Indikator Sikap Pelaksana

NO	Item Pertanyaan	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Pemahaman dan pendalaman program	5 (21%)	19 (79%)	-	24
2	Masyarakat ikut berpartisipasi dalam program	5 (21%)	19 (79%)	-	24
3	Kemampuan melakukan pengembangan program	4 (17%)	20 (83%)	-	24
Jumlah		14	58	-	72
Rata-Rata		5	19	-	24
Presentase		19%	81%	-	100%

Sumber: Data Olahan Penulis 2021

Dari tabel V.18 dapat dilihat bahwa tanggapan responden Ketua KTH dan Anggota KTH terhadap indikator Sikap Pelaksana dengan item penilaian pada pertanyaan pemahaman dan pendalaman program yang menjawab Terlaksana sebanyak 5 orang dengan presentase 21% , yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 19 orang dengan presentase 79%, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk item pertanyaan pemahaman dan pendalaman program mengatakan “Cukup Terlaksana”. Hal ini dikarenakan dalam pemahaman dan pendalaman program masih masyarakat masih banyak juga yang belum memahami dengan baik bagaimana teknis budidaya yang baik dan benar.

Untuk item penilaian kedua dengan pertanyaan mengenai masyarakat ikut berpartisipasi dalam program. Yang menjawab Terlaksana sebanyak 5 orang

dengan presentase 21%, yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 19 orang dengan presentase 79%, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab . jadi untuk item pertanyaan mengenai masyarakat ikut berpartisipasi dalam program mengatakan “Cukup Terlaksana” hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat kebanyakan masih cukup rendah karna beberapa faktor masyarakat yang cenderung malu-malu mengikuti program.

Dan untuk item penilaian ketiga dengan pertanyaan kemampuan melakukan pengembangan program. Yang menjawab Terlaksana sebanyak 4 orang dengan presentase 17%, yang menjawab Cukup Terlaksana sebanyak 20 orang dengan presentase 83%, dan yang menjawab Tidak Terlaksana tidak ada yang menjawab. jadi untuk pertanyaan kemampuan melakukan pengembangan program mengatakan “Cukup Terlaksan Terlaksana”. Hal ini dikarenakan kemampuan dalam melakukan pengembangan program oleh masyarakat kebanyakan belum bisa dan mengetahui bagaimana cara mengembangkan hasil olahan untuk hasil selain madu walaupun sebelumnya sudah pernah ada pelatihan.

Maka dapat disimpulkan bahwa jawaban yang terbanyak dijawab oleh Ketua KTH dan Anggota KTH terhadap indikator Sikap Pelaksana berada pada kategori “Cukup Terlaksana” yakni dengan rata-rata 19 orang dengan presentase 81% dari keseluruhan responden yang berjumlah 24 orang.

Berdasarkan hasil observasi penulis dilapangan terlihat bahwa partisipasi masyarakat suku talang mamak dalam pelaksanaan program masih terlalu rendah dikarenakan beberapa faktor seperti rendahnya kualitas SDM yang ada seperti

masih banyak yang tidak bisa baca tulis sehingga masyarakat cenderung malu untuk lebih aktif dalam program sehingga dalam upaya melakukan pengembangan program masyarakat juga masih belum banyak mengetahui langkah dan upaya seperti apa yang harus dilakukan.

Tabel V.19 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa Tentang Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu)

NO	Indikator (Item Penilaian)	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Standar dan Sasaran	4 (62%)	3 (38%)	-	7
2	Sumber Daya	2 (24%)	5 (76%)	-	7
3	Komunikasi Antar Organisasi	7 (100%)	-	-	7
4	Karakteristik Pelaksana	6 (86%)	1 (14%)	-	7
5	Lingkungan Sosial dan Ekonomi	7 (100%)	-	-	7
6	Sikap Pelaksana	5 (67%)	2 (33%)	-	7
Jumlah		31	11	-	42
Rata-Rata		5	2	-	7
Presentase		74%	26%	-	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Berdasarkan Tabel V.19 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden yakni Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa terhadap variabel tentang Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu), sesuai dengan indikator penelitian yang dibuat

oleh penulis yakni Standar dan sasaran mengenai penentuan kriteria penerima program, penetapan target hasil produksi madu yang hendak dicapai melalui program dan SOP (standart operational procedure). Sumber daya dengan item penilaiannya sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan ketersediaan dana. Komunikasi antar organisasi dengan item penilaiannya sosialisai tentang program, keterkaitan dengan pemerintah desa dan instansi lainnya. Karakteristik pelaksana dengan item penilaiannya jelasnya fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana, tingkat komitmen dan kejujuran pelaksana dan fasilitator penyelesaian masalah. Lingkungan sosial dan ekonomi dengan item penilaiannya adanya hubungan baik dengan masyarakat, adanya tanggapan positif masyarakat terhadap program dan pengaruh program terhadap program. Dan sikap pelaksana dengan item penilaiannya pemahaman dan pendalaman program, masyarakat ikut berpartisipasi dalam program dan kemampuan melakukan pengembangan program. Dengan rata-rata dari tanggapan reponden yang menjawab “Terlaksana” dengan rata-rata sebanyak 5 orang dengan presentase 74%, yang menjawab “Cukup Terlaksana” dengan rata-rata 2 orang dengan presentase 26%, dan yang menjawab “Tidak Terlaksana” tidak ada yang menjawab.

Berdasarkan hasil analisa kuesioner dengan teknik pengukuran peneliti dengan menggunakan teknik pengukuran presentase serta melalui analisa hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti maka dapat dilihat kesimpulan bahwa penelitian ini dengan rata-rata 5 orang dengan presentase 74% berada pada kategori “**Terlaksana**” dan dapat diartikan bahwa dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional

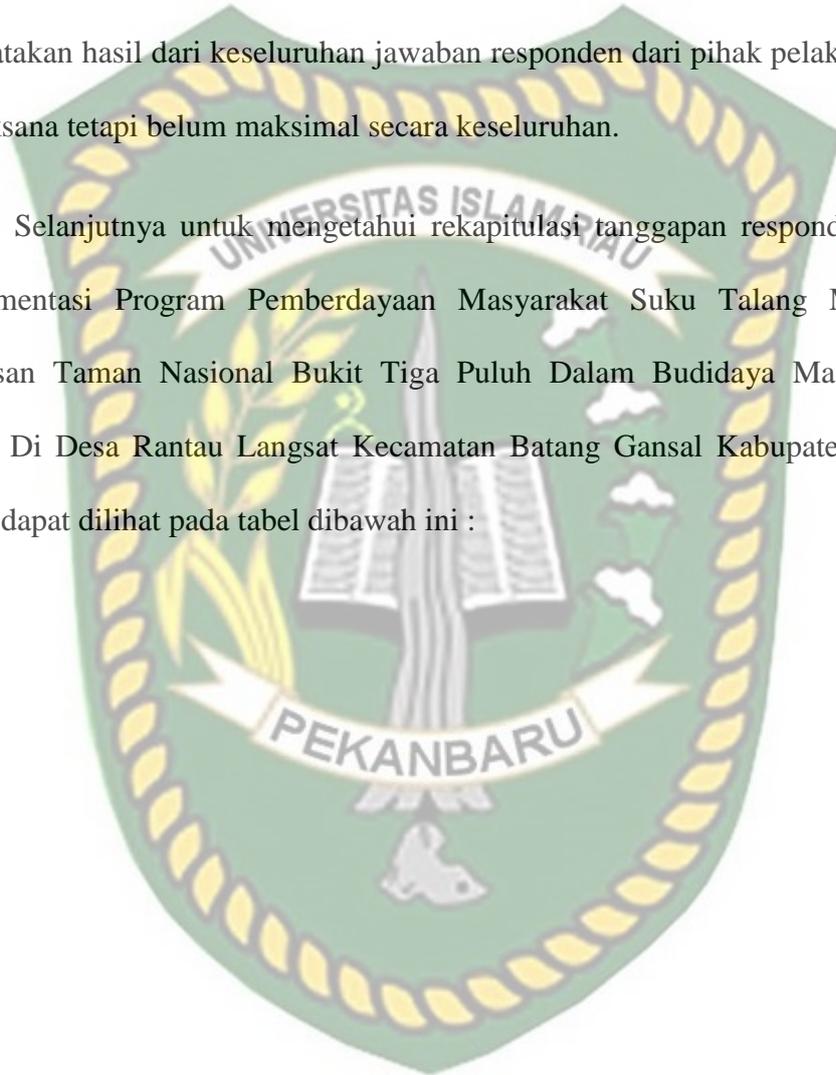
Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu) sudah Terlaksana dengan baik. Walaupun demikian masih ditemukan beberapa indikator yang belum terlaksanakan seperti pada indikator Sumberdaya yang mana jumlah SDM dalam mengawasi dan mendampingi kegiatan pemberdayaan ini masih kekurangan orangnya bahkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung masih didapati belum semuanya memadai sehingga program pemberdayaan ini masih bisa dikatakan belum maksimal secara keseluruhan.

Terutama pada indikator standar dan sasaran, responden yang menjawab Terlaksana berada pada skala pengukuran 62% atau 4 orang, untuk indikator sumber daya responden yang menjawab Terlaksana berada pada skala 24% atau 2 orang, pada indikator komunikasi antar organisasi responden yang menjawab Terlaksana berada pada skala 100% atau 7 orang, untuk indikator karakteristik pelaksana responden yang menjawab Terlaksana berada pada skala 86% atau 6 orang, untuk indikator lingkungan sosial dan ekonomi responden yang menjawab Terlaksana berada pada skala 100% atau 7 orang, dan untuk indikator sikap pelaksana responden yang menjawab Terlaksana berada pada skala 67% atau 5 orang dari keseluruhan responden Pihak Balai TNBT, Tenaga Ahli BP2TSTH Kuok dan Kepala Desa yang berjumlah 7 orang.

Dapat terlihat secara keseluruhan memang sudah terlaksana semua indikator yang ada hanya satu indikatorlah yang membuat program ini masih belum mendapatkan hasil penilaian yang mengarahkannya kepada predikat Terlaksana dengan maksimal, karna sama-sama kita ketahui Sumberdaya

merupakan suatu hal terpenting yang akan menentukan program bisa berjalan maksimal atau tidaknya sedangkan pada hasil ini indikator sumberdaya masih rendah untuk dikatakan terlaksana sehingga dengan demikian peneliti tetap akan mengatakan hasil dari keseluruhan jawaban responden dari pihak pelaksana sudah Terlaksana tetapi belum maksimal secara keseluruhan.

Selanjutnya untuk mengetahui rekapitulasi tanggapan responden tentang Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel V.20 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Ketua KTH dan Anggota KTH Tentang Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu)

NO	Indikator (Item Penilaian)	Kategori Penilaian			Jumlah
		T	CT	TT	
1	Standar dan Sasaran	20 (83%)	4 (17%)	-	24
2	Sumber Daya	11 (47%)	13 (53%)	-	24
3	Komunikasi Antar Organisasi	24 (100%)	-	-	24
4	Karakteristik Pelaksana	16 (65%)	8 (35%)	-	24
5	Lingkungan Sosial dan Ekonomi	20 (83%)	4 (17%)	-	24
6	Sikap Pelaksana	5 (19%)	19 (81%)	-	24
Jumlah		96	48	-	144
Rata-Rata		16	8	-	24
Presentase		67%	33%	-	100%

Sumber : Data Olahan Penulis 2021

Berdasarkan Tabel V.20 diatas dapat diketahui bahwa tanggapan responden yakni Ketua KTH dan Anggota KTH terhadap variabel tentang Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu), sesuai dengan indikator penelitian yang dibuat oleh penulis yakni Standar dan sasaran mengenai penentuan kriteria penerima program, penetapan target hasil produksi madu yang hendak dicapai melalui program dan SOP (standart operational procedure). Sumber daya dengan item peneliaannya sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan ketersediaan dana. Komunikasi antar

organisasi dengan item penilaiannya sosialisai tentang program, keterkaitan dengan pemerintah desa dan instansi lainnya. Karakteristik pelaksana dengan item penilaiannya jelasnya fungsi dan tanggung jawab masing-masing pelaksana, tingkat komitmen dan kejujuran pelaksana dan fasilitator penyelesaian masalah. Lingkungan sosial dan ekonomi dengan item penilaiannya adanya hubungan baik dengan masyarakat, adanya tanggapan positif masyarakat terhadap program dan pengaruh program terhadap program. Dan sikap pelaksana dengan item penilaiannya pemahaman dan pendalaman program, masyarakat ikut berpartisipasi dalam program dan kemampuan melakukan pengembangan program. Dengan rata-rata dari tanggapan reponden yang menjawab “Terlaksana” dengan rata-rata sebanyak 16 dengan presentase 67%, yang menjawab “Cukup Terlaksana” dengan rata-rata 8 dengan presentase 33%, dan yang menjawab “Tidak Terlaksana” tidak ada yang menjawab.

Berdasarkan analisa hasil kuesioner peneliti dengan menggunakan teknik pengukuran presentase serta berdasarkan analisa hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, maka dapat dilihat kesimpulan bahwa penelitian ini dengan rata-rata 16 orang dengan presentase 67% berada pada kategori “**Terlaksana**” namun masih belum maksimal secara keseluruhan dan dapat diartikan bahwa dalam Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu) sudah Terlaksana akan tetapi belum maksimal dan

demikian berarti masih ada beberapa indikator yang memperlihatkan bahwa pelaksanaan program ini masih belum terlaksana secara maksimal.

Terutama pada indikator standar dan sasaran, responden yang menjawab Terlaksana pada skala pengukuran 83% atau 20 orang, untuk indikator sumber daya, responden yang menjawab Terlaksana berada pada skala 47% atau 11 orang, untuk indikator komunikasi antar organisasi, responden yang menjawab Terlaksana berada pada skala 100% atau 24 orang, untuk indikator karakteristik pelaksana responden yang menjawab Terlaksana berada pada skala 65% atau 16 orang, untuk indikator lingkungan sosial dan ekonomi responden yang menjawab Terlaksana berada pada skala 83% atau 20 orang, dan untuk indikator sikap pelaksana responden yang menjawab Terlaksana berada pada skala 19% atau 5 orang dari keseluruhan responden Ketua KTH dan Anggota KTH yang berjumlah 24 orang.

Maka berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu) peneliti mengambil kesimpulan bahwa dengan adanya program pemberdayaan masyarakat melalui budidaya madu kelulut yang dibuat oleh pihak TNBT tentunya mendapat sambutan yang baik oleh masyarakat penerima program. Karna memang rata-rata masyarakat suku talang mamak khususnya untuk kebutuhan hidup dan pencaharian mereka masih sangat bergantung pada hasil alam yang ada di kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh tapi semakin

kesini hasil hutan juga sudah berkurang dan tidak banyak seperti dulu lagi sehingga memang yang menjadi kekhawatiran utama adalah karna faktor tersebut membuat masyarakat melakukan kegiatan perusakan hutan seperti *illegal logging* hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sulit terpenuhi lagi.

Dampak yang ingin dihadirkan tentu merupakan dampak positif karna melalui program ini sudah pasti harapannya adalah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat suku talang mamak dan menjadi alternatif pencaharian lainnya karna budidaya madu kelulut ini dapat dilakukan hanya dengan menunggu hasil panen serta sedikit melakukan perawatan sehingga dengan begitu masyarakat tetap bisa melakukan kegiatan lain seperti mencari penghasilan dari hasil hutan. Namun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan program ini terkhusus dari segi Sumber Daya Manusia karna sama-sama diketahui rendahnya kualitas SDM masyarakat suku talang mamak baik dari segi pendidikan dan kemampuan lainnya yang diperlukan dalam kegiatan pemberdayaan ini masih sangat rendah sehingga terkadang masyarakat juga masih banyak tidak mengerti bagaimana teknis pemanenan yang baik dan juga rendahnya kebiasaan masyarakat penerima program untuk merawat dan menjaga peralatan yang diberikan oleh pihak Balai TNBT sehingga hasil produksipun semakin menurun.

Disisi lain, jumlah penyuluh atau pendamping KTH juga terbilang terlalu sedikit jumlahnya mengingat jumlah KTH yang ada jauh lebih banyak dibanding penyuluh atau pendamping sehingga kegiatan pendampingan serta pengawasan terhadap KTH menjadi kurang maksimal bahkan disaat tertentu masyarakat yang ingin mendapatkan pendampingan juga bingung dalam keadaan mendapati

masalah kloni lebah kelulut yang selalu kabur tetapi kurang mendapat solusi dan pembinaan untuk mengantisipasi masalah tersebut.

Dan terakhir, sarana dan prasarana pendukung terkesan masih kurang memadai ada beberapa kondisi yang didapati oleh peneliti saat melakukan observasi saat ingin membeli madu langsung kepada masyarakat mereka tidak menggunakan alat panen yang sudah diberikan pihak Balai TNBT karena alat panen ada yang rusak dan juga sebagian hanya di pegang oleh ketua KTH saja, selain itu akses menuju lokasi cukup jauh berada di pedalaman kawasan TNBT sehingga kadang masyarakat maupun pendamping kesulitan untuk keperluan penjualan hasil produksi madu maupun keperluan pendampingan karna satu-satunya akses jalan juga hanya menggunakan transportasi air (*Boat*) untuk bisa mencapai lokasi. Satu hal lainnya lagi jaringan komunikasi juga sulit didapatkan di kawasan tersebut sehingga kurang memungkinkan bagi penyuluh atau pendamping KTH untuk menanyai perkembangan produksi madu kelulut yang didapat masyarakat dari jarak jauh sehingga terus menerus mengharuskan untuk hal ini penyuluh atau pendamping datang langsung ke lokasi.

C. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu)

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian ini dapat disimpulkan faktor-faktor yang menjadi penghambat terlaksananya Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu) diantaranya sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia yang ada dalam pelaksanaan program ini masih perlu ditingkatkan dan diperhatikan terkhusus kepada jumlah pendamping kelompok tani karna hal ini sangat menjadi bagian terpenting yang bisa mengarahkan program bisa terlaksana atau tidaknya secara baik.
2. Kurangnya kebiasaan masyarakat dalam hal menjaga dan merawat peralatan yang diberikan oleh pihak Balai TNBT sehingga menyebabkan ketersediaan alat dan bahan untuk keperluan produksi madu ini kadang cepat rusak dan bahkan hilang entah kemana.
3. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti program dengan semangat sehingga kadang masyarakat juga tidak terlalu bisa mengerti dan mendalami program dengan baik. Hal ini bukan tanpa alasan karna jika dilihat dari segi tingkat pendidikannya juga masyarakat banyak yang tidak sekolah sehingga terkadang malu untuk aktif dalam kegiatan.

4. Keterbatasan akses jalan dan jaringan komunikasi sehingga dalam beberapa keadaan tertentu bisa mempengaruhi pelaksanaan program dan bahkan sangat menghambat untuk proses pemasaran produk madu hasil produksi masyarakat ini.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahsan beserta analisis yang peneliti lakukan mengenai analisis tentang Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu) mendapatkan hasil pada pihak pelaksana dan penerima program dengan kategori Terlaksana dari beberapa indikator namun belum maksimal secara keseluruhan dalam pelaksanaannya hal ini dikarenakan dalam pelaksanaan program masih didapatkan pelaksanaannya yang kurang maksimal jika dinilai melalui indikator yang ada. Dapat dicontohkan pada indikator sumberdaya yang mana untuk jumlah sumber daya manusia yang mengawasi dan mendampingi pelaksanaan program masih terbatas jumlahnya, selain itu sarana dan prasarana pendukung yang masih belum memadai di beberapa hal seperti ketersediaan akses jalan yang belum memadai beserta kendaraan transportasi air yang juga belum tersedia dan dimiliki secara pribadi oleh pihak pelaksana serta akses jaringan komunikasi yang sangat kurang baik sehingga kurang bisa mempermudah pelaksanaan program jika diperlukan komunikasi jarak jauh. Serta yang terpenting masih dirasa kurang berpengaruhnya program ini yang dirasakan oleh masyarakat juga harus menjadi perhatian penting agar hasil atau *output* yang diharapkan benar bisa tercapai. Maka dapat penulis mengambil kesimpulan dan saran-saran untuk

bahan masukan bagi pihak terkait terutama bagi pihak Balai TNBT sebagai berikut :

1. Untuk indikator Standar dan Sasaran untuk responden pihak Pelaksana atau Pihak Balai TNBT dan masyarakat penerima program berada pada kategori Terlaksana. Dilihat dari standar dan sasaran proses penetapan sasaran penerima program dapat dikatakan sudah ada ditetapkan serta terlaksana beserta ketentuan dalam prosedur pelaksanaan program. Hanya saja untuk diketahui oleh masyarakat secara menyeluruh selaku penerima program belum terlalu dilaksanakan dengan optimal.
2. Untuk indikator Sumberdaya untuk responden pihak pelaksana dan masyarakat berada pada kategori cukup terlaksana. Pada hal ini dapat diketahui sumber daya manusia yang ada terkhusus untuk melakukan kegiatan pendampingan KTH masih terbatas jumlahnya sehingga pelaksanaan program dirasa kurang maksimal di tambah dengan kurang memadainya ketersediaan sarana dan prasarana juga menjadikan program tidak maksimal pelaksanaannya. Perlu ditingkatkan dan diperhatikan secara lebih pada indikator ini oleh pihak pelaksana khususnya agar nantinya program bisa mencapai pencapaian terbaiknya.
3. Untuk indikator Komunikasi Antar Organisasi responden pihak pelaksana dan masyarakat berada pada kategori Terlaksana. Pada

indikator komunikasi antar organisasi ini dilihat bahwa komunikasi yang tersampaikan mengenai program dikemas dalam sosialisasi yang sudah diikuti oleh pihak terkait dan pelaksanaannya juga sudah sangat baik.

4. Untuk indikator karakteristik pelaksana responden pihak pelaksana dan masyarakat berada pada kategori terlaksana. Pada karakteristik pelaksana ini dilihat bahwa pelaksanaannya sudah sangat baik dalam program karna semua sudah menjalankan fungsi dan tanggung jawab dengan ketentuan yang ada dan juga memiliki komitmen dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat juga sangat tinggi dan selalu bisa menjadi penyelesaian masalah yang baik dalam pelaksanaan program pemberdayaan ini.
5. Untuk indikator Lingkungan Sosial dan Ekonomi responden pihak pelaksana dan masyarakat berada pada kategori terlaksana. Pada lingkungan sosial dan ekonomi ini jika dilihat dari sisi sosialnya hubungan baik dan tanggapan positif masyarakat terhadap program pemberdayaan sudah sangat tinggi hanya saja pada sisi ekonominya masyarakat masih merasa program masih kurang berpengaruh untuk meningkatkan pendapatan mereka.
6. Untuk indikator Sikap Pelaksana untuk responden pihak pelaksana berada pada kategori terlaksana sedangkan responden masyarakat berada pada kategori cukup terlaksana. Sikap pelaksana dalam proses

pelaksanaan program memang sudah cukup baik hanya saja pada bagian masyarakat kemampuan dalam memahami program dan partisipasi terhadap program pemberdayaan masyarakat ini cukup rendah sehingga banyak masalah berkaitan hal teknis budidaya dan pengembangan program masih kurang bisa dilaksanakan dengan maksimal.

7. Dari tabel rekapitulasi tanggapan responden pihak pelaksana dengan kuesioner dan wawancara mengenai analisis tentang Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu) yang terdiri dari enam indikator yakni standar dan sasaran, sumberdaya, komunikasi antar organisasi, karakteristik pelaksana, lingkungan sosial dan ekonomi, dan sikap pelaksana berada pada kategori terlaksana dengan rata-rata 5 orang dengan presentase 74% dari 7 responden.
8. Dari tabel rekapitulasi tanggapan responden masyarakat Ketua dan anggota KTH dengan kuesioner dan wawancara mengenai analisis tentang Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsung Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu) yang terdiri dari enam indikator yakni standar dan sasaran, sumberdaya, komunikasi antar

organisasi, karakteristik pelaksana, lingkungan sosial dan ekonomi, dan sikap pelaksana berada pada kategori terlaksana dengan rata-rata 16 orang dengan presentase 67% dari 24 responden.

9. Faktor-faktor yang menjadi penghambat Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Suku Talang Mamak Di Kawasan Taman Nasional Bukit Tiga Puluh Dalam Budidaya Madu Kelulut (Studi Di Desa Rantau Langsat Kecamatan Batang Gansal Kabupaten Indragiri Hulu) yaitu Sumber daya manusia yang ada dalam pelaksanaan program ini masih perlu ditingkatkan dan diperhatikan lebih karena hal ini sangat menjadi bagian terpenting yang bisa mengarahkan program bisa terlaksana atau tidaknya secara baik. Kurangnya kebiasaan masyarakat dalam hal menjaga dan merawat peralatan yang diberikan oleh pihak Balai TNBT sehingga menyebabkan ketersediaan alat dan bahan untuk keperluan produksi madu ini kadang cepat rusak dan bahkan hilang entah kemana. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk mengikuti program dengan semangat sehingga kadang masyarakat juga tidak terlalu bisa mengerti dan mendalami program dengan baik. Hal ini bukan tanpa alasan karena jika dilihat dari segi tingkat pendidikannya juga masyarakat banyak yang tidak sekolah sehingga terkadang malu untuk aktif dalam kegiatan. Keterbatasan akses jalan dan jaringan komunikasi sehingga dalam beberapa keadaan tertentu bisa mempengaruhi pelaksanaan program dan bahkan sangat

menghambat untuk proses pemasaran produk madu hasil produksi masyarakat ini.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan dalam penelitian yang mungkin bisa dijadikan bahan masukan bagi pihak terkait untuk pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam budidaya madu kelulut yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Dilihat dari indikator standar dan sasaran dalam proses penyusunan baik penetapan kriteria penerima program, penetapan hasil produksi madu dan pembuatan prosedur pelaksanaan kegiatan pemberdayaan hendaknya bisa disampaikan kepada seluruh pihak terkait agar nantinya pelaksanaan program pemberdayaan ini bisa mencapai hasil yang diharapkan.
2. Dilihat dari indikator sumberdaya terkhusus pada sumber daya manusia dalam melakukan pendampingan dan monitoring kepada kelompok tani hendaknya lebih ditingkatkan jumlahnya karna jika jumlah kelompok tani lebih banyak dari pada sumber daya manusia yang menjadi pendampin tentu akan kesulitan dalam melaksanakan pendampin dan monitoring kelompok tani nantinya.
3. Dilihat dari komunikasi antar organisasi pelaksanaan sosialisasi yang sudah diupayakan semaksimal mungkin juga lebih baiknya ditambahkan lagi dengan kegiatan pelatihan pengembangan yang dilaksanakan rutin

dalam kurun waktu tertentu baik itu dalam bentuk seminar atau dengan kegiatan pemberian materi oleh pihak lainnya yang juga ikut dilibatkan seperti bagaimana promosi hasil produksi dengan menjalin kerjasama dengan pemerintah kecamatan sampai ke pemerintah kabupaten.

4. Dilihat dari karakteristik pelaksana peran penting pihak Balai TNBT lebih di optimalkan dalam hal pendampingan masyarakat dalam penyelesaian masalah yang hadir dalam kegiatan pemberdayaan baik mengenai teknis budidaya yang paling baik seperti apa dan juga lebih kepada membantu masyarakat dalam penyelesaian masalah yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan yang paling sulit dipecahkan mereka yakniantisipasi kaburnya kloni lebah dari sarang yang sudah disediakan.
5. Dilihat dari lingkungan sosial dan ekonomi terjalannya hubungan yang baik dilingkiungan masyarakat penerima program harus lebih bisa ditingkatkan lagi dengan selalu memberikan hal-hal positif kepada masyarakat sehingga memunculkan semangat dan kesadaran bersama untuk meningkatkan kesuksesam pencapaian tujuan program pemberdayaan ini. Dan untuk bagian lingkungan ekonomi disituasi masyarakat yang merasa pengaruh dari program terhadap pendapatan mereka masih tergolong kurang berpengaruh harus menjadi perhatian khusus agar masyarakat tetap fokus dalam pelaksanaan program ini saja tanpa berpikir mencari jalan pintas untuk mendapat penghasilan lain seperti dengan melakukan kegiatan dengan potensi perusakan hutan dikawasan TNBT.

6. Dilihat dari sikap pelaksana hal yang paling harus di perhatikan adalah keikutsertaan masyarakat dalam program yang masih rendah, walaupun mungkin yang menjadi faktor yang membuat masyarakat enggan berpartisipasi terhadap program adalah tingkat pendidikan mereka namun solusi terbaik adalah dengan terus memotivasi masyarakat untuk merasa percaya diri dan mau melakukan kegiatan pemberdayaan dengan antusias yang tinggi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA,cv.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA,cv.
- Agustino, Leo. 2014. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA,cv.
- Ali, Zaini dan Raden Imam Al Hafis. 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpotan Tujuh.
- Anwas. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global*. Bandung: ALFABETA,cv.
- Awang, Azam. 2010. *IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN PEMERINTAH DESA Studi Kajian Pemberdayaan Berdasarkan Kearifan Lokal di Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR.
- Guntur, M. Effendi. 2009. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Transformasi Perekonomian Rakyat Menuju Kemandirian Dan Keadilan*. Jakarta: CV Sagung Seto.
- Indiahono, Dwiyanto. 2016. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Irawan, Beddy. 2017. *Dasar-Dasar Administrasi Publik*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Manullang. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nawawi, Zaidan. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Syafri, Wirman. 2012. *Studi Tentang Administrasi Publik*. Jakarta: Erlangga.
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *SISTEM ADMINISTRASI NEGARA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA (SANKRI)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suharto, Edi. 2015. *Analisis Kebijakan Publik Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*. Bandung: ALFABETA,cv.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2017. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT.Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Zulkifli & Moris Adidi Yogia. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh.

JURNAL :

Auradian Marta(2014). Strategi Pemerintah dalam pengembangan masyarakat lokal (studi di kawasan taman nasional bukit tiga puluh kabupaten indragiri hulu provinsi riau)

Avry Pribadi (2020). Pemberdayaan dan Usaha peningkatan ekonomi Suku Talang Mamak di kawasan TNBT melalui budidaya kelulut.

Bambang Santoso(2014). Strategi Pengembangan Ekowisata Berdasarkan Daya Dukung Lingkungan Di Taman Nasional Bukit Tiga puluh Propinsi Riau

Undang-Undang :

Undang-undang No.5 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.43/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2017

Peraturan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Nomor : P.6/KSDAE/SET/kum.1/6/2018

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 6407/Kpts-II/2002 tanggal 21 juni 2002

DOKUMEN LAINNYA

Grafik Perkembangan pengelolaan

Struktur Balai TNBT

Program Kemitraan konservasi

RPJP Balai Taman Nasional Bukit Tiga Puluh tahun 2014-2025